

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA
PEMERINTAH KOTA BATAM**



TAPM Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Bidang Manajemen Administrasi Publik

Disusun Oleh :

SYOFYAN

NIM : 014827458

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010**

ABSTRAK**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH PADA PEMERINTAH KOTA BATAM****SYOFYAN****UNIVERSITAS TERBUKA**

syofyan_map16@yahoo.co.id

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program pemberdayaan usaha kecil dan menengah pada pemerintah Kota Batam yang dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, peneliti juga ingin melihat apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah kota Batam dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Tangkilisan dan George Edward III (dalam winarno, 2004:126) yang mengemukakan yang menyebutkan evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator yaitu input, proses, output serta outcome yang memfokuskan pada sumber daya kebijakan. Sedangkan George Edward III menyebutkan unsur sumber daya meliputi adanya sumber daya manusia dan informasi tentang suatu kebijakan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah para pengusaha UKM yang ada di kota Batam. Sampel penelitian ini ditentukan dengan formula slovin yang akhirnya ditentukan sebanyak 65 orang sampel.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa program pemberdayaan UKM yang ada di kota Batam meliputi kegiatan meningkatkan kualitas usaha kecil dan menengah, dengan mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan perencanaan bisnis, pelatihan kewirausahaan, pembinaan manajemen bagi usaha kecil dan menengah, Menyediakan sarana pemasaran, dengan menyediakan sarana pemasaran dalam bentuk pameran, bazar yang diadakan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Disamping itu terhadap juga beberapa hal yang mempengaruhi proses evaluasi program ini yaitu Pada Faktor komunikasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Bidang Pemasaran Produk Pada Pemerintah Kota Batam telah dikomunikasikan dan diinformasikan dengan baik kepada para pelaku UKM yang ada dikota Batam sebagai sasaran program ini. Informasi yang diterima pelaku UKM kota Batam juga sudah jelas tentang adanya program pemberdayaan UKM, dalam hal koordinasi antar instansi dan bagian para pelaksana program juga sudah berjalan dengan baik. Pada faktor sumber daya, program ini telah didukung dengan sumber daya financial, staf dan sarana prasarana.

ABSTRACT**EVALUATION EMPOWERMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
PROGRAM BATAM CITY GOVERNMENT**

SYOFYAN
UNIVERSITAS TERBUKA
 syofyan_map16@yahoo.co.id

Research was conducted to find out how to program evaluation empowerment of small and medium enterprises in the government of Batam as seen from then factors that influence it, the researchers also wanted to see what activities are conducted in Batam municipal empowerment of small and medium enterprises.

This study refers to the teori advanced by Tangkilisan and George Edward III (in Winarno, 2004:126) tho argued that mention of policy evaluation based on four indicators of input, processes, outputs and outcomes that focus on resource policy. Meanwhile, George Edward III mentions the element of resources covering the human resources and information about a policy. The type of research use descriptive research using the techniques of data collection with interviews and questionnaires were analyzed by descriptive quantitative. The subject of this study is the SMEs in the city of Batam. Sample slovin determined by a formula that finally determined by 65 samples.

From the results of research can be argued the SMEs empowerment program in the city of Batam include activities to improve the quality of small and medium enterprises, by conducting training activities such as training in business planning, entrepreneurship training, management development for small and medium enterprises, provided a means of marketing, with provides a means of marketing in the form of exhibitions, fair are held for small and medium sized businesses.

In addition to the wel a few things that affect the evaluation process of this program is the communication factor, it can be concluded that the implementation of the Empowerment Programme for Small and Medium Enterprises in the Field of Product Marketing at Batam City Government has been communicated and well informed to the perpetrators of the existing SMEs in the Batam as this program targets. Information received by SMEs in Batam also been clear about the empowerment of SMEs, in term of coordination between implementing agencies and sections of the program has alos been running well. On the factors of resources, this program has beed supported by financial resources, staff and infrastructure.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH PADA PEMERINTAH KOTA
BATAM.
Penyusun TAPM : SYOFYAN
NIM : 014827458
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Hari / Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II



Suciati, M.Sc., Ph.D.

Pembimbing I

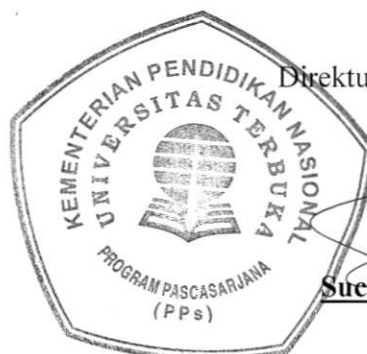

Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si

Mengetahui,

Kepala Bidang ISIP


Dra. Susanti, M.Si

Direktur Program Pascasarjana




Suciati, M.Sc., Ph.D

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : SYOFYAN
 NIM : 014827458
 Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul TAPM : EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
 KECIL DAN MENENGAH PADA PEMERINTAH
 KOTA BATAM.

Telah Dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Sabtu / 11 Desember 2010
 Waktu : Pukul 15.00 – 17.00 Wib

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Dr. Tita Rosita, M.Pd

Penguji Ahli : Dr. Roy V. Salomo, M. Soc., Sc.

Pembimbing I : Dr. Meyzi Herianto, S.Sos., M. Si

Pembimbing II : Suciati, M.Sc., Ph. D





**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

MENYATAKAN

TAPM yang berjudul **EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH PADA PEMERINTAH KOTA BATAM**
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (Plagiat),
maka saya bersedia menerima
sanksi akademik.

Batam, Desember 2010

Yang Menyatakan



SYOFYAN
NIM. 014827458

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan segala puji syukur penulis menyampaikan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-NYA serta shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Pemerintah Kota Batam.

Penyusunan tugas ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian pasca sarjana pada Universitas Terbuka Jakarta. Dan penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tugas akhir ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu melalui lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph. D selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan saran-saran dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Dr. Suciati, M.Sc yang juga selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan saran-saran demi kesempurnaan penulisan tugas akhir ini.
5. Para Dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis, serta seluruh pegawai yang ada lingkungan Universitas Terbuka yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses perkuliahan.

6. Drs. HZ Dadang AG, M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam, yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data di tempat penelitian.
8. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam.
9. Bapak Zakaria selaku kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM kota Batam.
10. Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana Universitas Terbuka UPBBJJ Pekanbaru yang selalu memberikan semangat dan perhatian kepada penulis.
11. Kepada Kedua Orang Tua, Istriku (Yusliati) dan Kedua Putriku (Putri Dindi dan Syofi Yusti Azura) yang selalu memberikan dorongan, semangat, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, Terima kasih atas segala pengorbanan dan pengertiannya selama ini.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, mulai dari masa perkuliahan maupun hingga proses penyusunan Tugas akhir ini.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik, saran dan bimbingan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Amin.

Batam, Desember 2010

Penulis

SYOFYAN

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	
1. Tugas dan Fungsi Pemerintah	10
2. Program	14
3. Implementasi Pelaksanaan Program	16
4. Pemberdayaan	27
5. Evaluasi Program	28
6. Usaha Kecil dan Menengah	34
7. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	36
B. Kerangka Berpikir	38
C. Defenisi Operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Populasi dan Sampel	45
C. Instrumen Penelitian	47

D. Prosedur Pengumpulan Data	49
E. Metode Analisa Data	50
F. Analisa Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Identifikasi Responden	63
1. Distribusi Frekwensi umur responden	63
2. Distribusi Frekwensi jenis kelamin responden	64
3. Distribusi Frekwensi pendidikan responden	65
C. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Bidang Pemasaran Produk Pada Pemerintah Kota Batam	
1. Meningkatkan kualitas usaha kecil dan menengah	67
2. Menyediakan sarana pemasaran	77
3. Memberikan dukungan jaringan pemasaran	80
D. Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Pemerintah Kota Batam.	
1. Komunikasi	84
2. Sumber Daya	92
BAB I KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Defenisi Operasional	42
Tabel 3.1	Data Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Batam.....	45
Tabel 3.2	Bobot Tingkat Penerimaan/Persetujuan.....	50
Tabel 4.1	Distribusi Frekwensi Umur Responden	64
Tabel 4.2	Distribusi Frekwensi Jenis Kelamin Responden.....	65
Tabel 4.3	Distribusi Frekwensi Pendidikan Responden	65
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Terhadap Adanya Pelatihan Perencanaan Bisnis	68
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Terhadap Adanya Pelatihan Kewirausahaan	72
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Terhadap Adanya Pembinaan Manajemen Usaha	77
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Terhadap Adanya Sarana Pemasaran	77
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Jaringan Pemasaran	81
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Terhadap Sub Indikator Kejelasan Informasi	85
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Kebijakan	87
Tabel 4.11	Tanggapan Responden Terhadap sub indikator koordinasi	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara
Lampiran 2	Kuesioner
Lampiran 3	Tabulasi Data Jawaban Responden

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa menciptakan peluang bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri, dan industri-industri lainnya dapat berfungsi sebagai subkontraktor yang kuat dan efisien bagi usaha besar. Perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri pedesaan dan industri yang berbasis sumber daya alam terutama pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan dan pariwisata serta kerajinan rakyat memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya UKM.

Populasi UKM tercatat sebanyak 48,9 juta unit usaha atau 99,98% terhadap total usaha di Indonesia, sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam UKM ini tercatat sebanyak 85,4 juta orang atau 96,18% dari seluruh tenaga kerja Indonesia (BPS : 2006). Dari data ini, tampak jelas bahwa UKM memiliki kontribusi yang cukup besar sehingga perlu dilakukan pemberdayaan secara intens dan sustainable. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah pusat untuk mengurangi gap penguasaan aset ekonomi oleh sebagian kecil pengusaha besar dan sebagian besar pelaku ekonomi di tingkat rakyat. Namun demikian kondisi yang ada di berbagai daerah termasuk di Kota Batam menunjukkan bahwa perkembangan UKM pada umumnya masih menghadapi berbagai kendala seperti masalah skill atau sumber daya manusia, permodalan, pemasaran produk, teknologi, sistem informasi, dan sebagainya.

Perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada upaya pemberdayaan UKM sebagai pilar ekonomi rakyat dan sebagai tulang punggung ekonomi nasional karena ekonomi ini bersifat mandiri, tidak menyusahkan atau membebani ekonomi nasional di saat krisis, dan daya tahan ekonominya tidak diragukan lagi. Untuk itu pembangunan ekonomi haruslah didasarkan pada kekuatan lokal dan nasional untuk tidak hanya mencapai nilai tambah ekonomi melainkan juga nilai tambah sosial-kultural, yaitu peningkatan martabat dan kemandirian.

Sementara itu, menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengatakan bahwa : Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu segera dilakukan. Hal itu mengingat berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2006 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) usaha kecil menengah (UKM) memberikan kontribusi senilai Rp. 1,77 triliun atau 53,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp. 3,3 triliun. (Batam Pos, 26/03/2007) Daya tahan dan kekuatan ekonomi rakyat juga dibuktikan dari kemampuannya bertahan dalam krisis moneter berkepanjangan.

Menurut Mubyarto (2002:4) : Potensi domestik, yaitu kekuatan ekonomi rakyat telah terbukti tahan banting dalam situasi krisis moneter, dan telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari kehancuran total. Ekonomi Indonesia hanya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) satu tahun saja pada tahun 1998, dan mulai tahun 1999 dan seterusnya sudah tumbuh positif. Hal ini perlu dicatat sebagai bukti bahwa sektor ekonomi rakyat dalam waktu pendek telah pulih kembali meskipun ekonomi sektor modern masih menghadapi kesulitan dan tertatih-tatih untuk bangun kembali.

Ciri-ciri ekonomi rakyat yang hendak dicapai bersama adalah : Pembangunan yang dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik pada daerah kabupaten/kota dengan tingkat kemandirian yang tinggi, kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif, persaingan sehat, keterbukaan/demokratis, dan pemerataan yang berkeadilan. Semua ini merupakan ciri-ciri dari ekonomi rakyat (Prawirokusumo, 2001).

Oleh karena itu komitmen keberpihakan pemerintah daerah pada UKM di dalam perspektif ekonomi rakyat harus benar-benar diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah yang disebut di atas. Program pengembangan ekonomi rakyat memerlukan adanya program-program operasional di tingkat bawah, bukan sekadar jargon-jargon politik yang hanya berada pada tataran konsep. Suatu kenyataan bahwa hal ini belum dipahami secara memadai oleh sebagian besar Pemerintah Daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan dalam hal tersebut masih sangat terbatas.

Tantangan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya UKM adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM agar dapat meningkatkan pangsa pasarnya, serta mendiversifikasi dan mendiferensiasikan produknya di pasar dalam negeri dan luar negeri. Upaya ini memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan UKM itu sendiri untuk menyatukan potensi sumberdayanya dalam pemberdayaan UKM pada masa mendatang. Pemerintah dan dunia usaha perlu mengembangkan langkah-langkah strategis yang bersifat inovatif dalam memberdayakan UKM dengan menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif dan memberikan dukungan

penguatan agar UKM mampu bersaing secara global .(Departemen Koperasi dan UKM, 2006:4).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kota Batam dengan letak geografisnya yang sangat strategis sebagai salah satu kota di provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional. Kota ini memiliki jarak yang dekat dengan Singapura dan Malaysia. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, dan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam hingga Januari 2009 Kota Batam telah berpenduduk 965.062 jiwa dan merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga populasinya di Sumatra setelah Medan dan Palembang.

Meskipun demikian potensi ini belum diberdayakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah terbukti dengan belum adanya aktivitas yang cukup signifikan dalam upaya pengembangan UKM. Dana pemerintah yang dialokasikan untuk sektor ini pada tahun 2006/2007 tidak lebih dari tujuh miliar rupiah dan pembinaan yang diberikan sebagian besar masih bersifat teoritis konseptual secara umum untuk berbagai macam UKM sehingga sulit diimplementasikan. Di samping itu usaha meningkatkan penjualan/pemasaran produk melalui promosi atau iklan pemasaran juga masih sangat minim. Promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah justru lebih diarahkan untuk usaha-usaha berskala menengah besar yang sudah relatif mapan dan mandiri. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah dalam hal pembinaan UKM masih sangat lemah dan belum proporsional.

Permasalahan umum yang dihadapi koperasi dan UKM, antara lain adanya keterbatasan kepemilikan dan akses permodalan, keterbatasan pemasaran, dan kemitraan. Permasalahan permodalan sedikit banyak sudah teratasi dengan berbagai jenis program pembiayaan, seperti program pembiayaan produktivitas koperasi dan usaha mikro, program perempuan keluarga sehat (perkasa), dan lain sebagainya. Namun demikian masalah kesulitan atau keterbatasan di bidang pemasaran yang dialami UKM belum mendapatkan perhatian cukup dari Pemerintah Daerah terutama dalam hal promosi penjualan dan investasi. Hal ini tampak dari belum jelasnya kegiatan Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana, penguatan, serta dukungan di bidang informasi khususnya dalam kegiatan periklanan untuk pemasaran produk dengan melibatkan UKM mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi.

Tuntutan akan pemberdayaan UKM sejalan dengan telah terjadinya perubahan mendasar dari paradigma lama pemerintahan birokratis ke arah paradigma baru sesuai dengan kebijakan Otonomi daerah berdasarkan UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian disempurnakan menjadi UU 32/2004 yaitu kewenangan pusat kepada daerah, memberikan peluang sekaligus tantangan kepada daerah dalam mengelola, mengembangkan dan memberdayakan UKM.

Sejalan dengan berbagai pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan UKM di Indonesia, maka di Kota Batam telah terjadi pertumbuhan lembaga UKM yang cukup pesat dari waktu ke waktu. Jumlah UKM yang terus bertambah merupakan catatan positif kelembagaan UKM di

Kota Batam. Namun dari sisi lain timbul pencitraan yang kurang baik terhadap UKM ini terbukti dari 10.000 UKM yang ada di Kota Batam hanya 1.700 UKM yang aktif dan telah dibina oleh Dinas PMP-KUKM Kota Batam (Renstra PMP-KUKM 2006-2011).

Pemerintah kota Batam kemudian berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui penyediaan berbagai kesempatan berusaha dibidang UKM. Namun, usaha tersebut mendapatkan kendala dari pihak UKM itu sendiri. Salah satu kendala oleh terbatasnya jaringan pemasaran produk UKM. Hal ini menyebabkan terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan UKM yang telah ada di kota Batam dan keraguan bagi masyarakat yang lain untuk mau membuka berbagai jenis kegiatan usaha lain.

Melihat kendala-kendala di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kota Batam merasa perlu memberdayakan UKM dengan mengembangkan dan memperkuat kelembagaan UKM yang dapat mendukung pengembangan jaringan pemasaran UKM. Adapun tindak lanjut dari kebijakan ini adalah lahirnya sebuah program pemberdayaan kelembagaan UKM di kota Batam.

Program pemberdayaan UKM tersebut mencakup kegiatan pengembangan jaringan pemasaran. Kegiatan ini lahir dengan asumsi bahwa sebaik apapun UKM dalam mengelola usahanya jika tidak memiliki pasar untuk memasarkan produknya maka UKM tersebut akan mati secara perlahan. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan UKM. Karena UKM yang dikatakan berhasil adalah apabila memiliki jaringan pemasaran yang baik dan

kuat, yang dapat diandalkan bagi penjualan dan pengembangan produk-produknya.

Bertitik tolak dari uraian di atas rendahnya kualitas UKM dalam hal pemasaran produk di Kota Batam, maka penelitian ini merumuskan pernyataan masalah ” Evaluasi Program Pemberdayaan UKM di Kota Batam belum berjalan sebagaimana mestinya .” Apabila kondisi ini tidak segera dibenahi maka program pemberdayaan UKM akan mengarah pada pemborosan sumber daya, karena minimnya kepercayaan masyarakat terhadap UKM.

Pemberian kewenangan kepada daerah dalam pemberdayaan UKM sebagai desentralisasi pemerintahan wirausaha yang mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik. UKM selalu menjadi sasaran pengembangan dari berbagai institusi pemerintah, namun pengembangan tersebut belum menunjukkan terwujudnya pemberdayaan terhadap UKM.

B. Perumusan Masalah

Sebuah kebijakan yang melalui proses pembuatan kebijakan yang benar akan menghasilkan tujuan kebijakan (*policy goal*) yang mampu menyelesaikan inti permasalahan. Proses tersebut tidak bisa terlepas dari fungsi analisis kebijakan sebagai basis dari proses pembuatan kebijakan (*decision making process*).

Berkaitan dengan program pemberdayaan UKM, dibutuhkan proses kebijakan yang baik pula. Permasalahan tersebut memerlukan intervensi kebijakan dan perencanaan yang baik oleh pemerintah sebagai upaya distribusi kesejahteraan masyarakat atau mekanisme pasar tidak mampu untuk

memenuhinya. Dalam upaya pemberdayaan UKM di kota Batam, dari pengamatan awal penulis, didapatkan berbagai permasalahan, seperti : kualitas SDM, penguasaan teknologi, akses pada teknologi, permodalan, sulitnya pemasaran produk, akses terhadap pasar, komitmen dari pemerintah pusat dan daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas sebenarnya merupakan permasalahan klasik yang dihadapi dalam pemberdayaan UKM, namun karena kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah selama ini sering tidak mengarah pada inti permasalahan yang dihadapi dan kurang memperhatikan potensi dan akibat-akibat dari kebijakan dari masa lalu dan yang akan datang. Permasalahan tersebut selalu muncul sebagai kendala dalam pemberdayaan UKM.

Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tanpa adanya prioritas, arah dan sasaran yang jelas. Dan dengan adanya keterbatasan-keterbatasan sumber daya dan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, akan menghasilkan kebijakan yang tidak mengandung nilai tambah yang signifikan bagi keberhasilan upaya pemberdayaan UKM di kota Batam.

Mengingat berbagai keterbatasan yang dihadapi maka tidak semua permasalahan tersebut diteliti. Penelitian ini merupakan studi evaluasi akan tetapi perhatian penelitian ini hanya difokuskan pada permasalahan **"Bagaimana Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Pemerintah Kota Batam?"**

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Batam.
2. Menganalisis tentang Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Pemerintah Kota Batam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian kualitatif mengenai kegiatan usaha kecil dan menengah pada Pemerintah Kota Batam berguna untuk :

1. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi kebijakan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah.
2. Memberikan masukan untuk meningkatkan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah.
3. Sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya yang juga meneliti tentang analisa implementasi kebijakan, khususnya kebijakan tentang pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Latar belakang dibentuknya suatu pemerintahan adalah untuk merespon suatu kondisi alamiah yang mereka hadapi, yang membutuhkan suatu solusi (*disadvantages of their natural condition*). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam rangka menciptakan keadilan dan ketertiban dan dapat dipahami bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, rakyat adalah pemilik dan pemegang kedaulatan negara. Untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan pemerintah yang aspiratif dan responsif, pemerintah dimaksud bertanggung jawab terhadap pelayanan, pemenuhan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Pemerintah yang responsif dan aspiratif dapat diwujudkan dengan cara mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Senada dengan itu Rasyid (2000:7) menyatakan bahwa "penyelenggaraan pemerintahan akan efisien dan efektif jika antara yang memberi pelayanan dan perlindungan dengan yang diberikan pelayanan dan perlindungan berada dalam jarak hubungan yang relatif dekat".

Di samping faktor kedekatan, adanya hak dan kewenangan juga merupakan faktor penting yang harus dimiliki suatu daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan

kondisi real dalam rangka menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada konteks pemerintahan modern, yang ditandai oleh meningkatnya kedudukan pelayanan dimata masyarakat menjadi suatu hak atas pelayanan, Rasyid (2000:11) memberi pandangan menarik mengenai fungsi pemerintahan sebagai berikut:

Pemerintahan modern dengan kata lain adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Lebih lanjut Rasyid (2000:13) menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar; menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.

Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik

dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. *Ketujuh*, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Di bagian lain Rasyid (2000:48), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hak, yaitu : pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Selanjutnya Rasyid menjelaskan, bahwa : “pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.”

Oleh Ndraha (2001:85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu :

Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*servicing*), sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan di atas maka fungsi pemerintah atau tugas pemerintah adalah benar-benar sebagai abdi masyarakat, menciptakan kondisi aman dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat, membina kemandirian dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Kedekatan hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Suatu rumusan apabila dilandaskan pada kepentingan bersama pasti akan memberikan kontribusi yang berarti bagi tujuan yang hendak dicapai.

Selanjutnya makna tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat menurut Ndraha (1997:78), dasar-dasar filosofi hubungan dan posisi antara negara, pemerintah dan rakyat disebut hubungan kerakyatan. Hubungan

dan posisi pemerintah dan rakyat menghasilkan tugas dan fungsi pemerintah/negara sebagai pelayan dan rakyat didudukkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hubungan kerakyatan ini bersifat timbal balik bahkan overlapping, tergantung dari antar posisi dan antar kapasitas masing-masing pada suatu situasi dan kondisi tertentu.

Konfigurasi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, kedudukannya tidak lebih tinggi dari yang dilayani (masyarakat). Sebagai pelayan (produser, penyedia jasa layanan), pemerintah harus berjanji dan bertanggung jawab kepada masyarakat selaku konsumen yang sekaligus adalah pemegang saham. Sejalan dengan itu, lebih lanjut Kaufman (dalam Thoha, 1995:101-102) menyebutkan bahwa :

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Begitu luas dan kompleknya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat berat diatas pundaknya. Untuk mengemban semua beban itu, selain diperlukan sumber daya, nilai, dukungan lingkungan, juga dibutuhkan aparat yang mempunyai motivasi, inovasi yang tinggi dalam pelaksanaan berbagai tugas tersebut. Sebagai upaya dalam mengemban tugas dan fungsi pemerintahan maka peningkatan sumber daya manusia merupakan motor dalam menggerakkan sumber-sumber lain. Kekuatan

suatu negara selain pada penyelenggara pemerintah juga tergantung pada kualitas bangsanya.

2. Program

Program adalah suatu rencana yang harus dilaksanakan. Program ini merupakan serangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Suharsini, 1998:1). Selanjutnya menurut Hasibuan (2001:100) menyebutkan bahwa "program adalah suatu rencana yang konkrit. Rencana ini konkrit karena dalam program sudah menentukan sasaran, kebijakan, prosedur, waktu maupun anggaran keuangannya".

Jadi program juga merupakan usaha-usaha untuk mengefektifkan kegiatan yang harus dilaksanakan menurut bidang masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu rencana kegiatan yang telah disusun secara sistematis dan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dalam program akan tergambarkan bagaimana rencana yang telah ditentukan akan dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan menurut Tambunan (2000:41) "program dirumuskan untuk melaksanakan strategi, jadi dalam strategi ini terdapat tujuan dan misi. Tujuan (*goal*) merupakan *open-ended* mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi". Oleh karena dalam program diperlukan suatu kajian terlebih dahulu, hal ini perlu untuk menghindarkan agar program tersebut tidak bersifat obyektif yang artinya program tersebut bukan keinginan (*want*) atasan atau unit organisasi yang lebih tinggi, tapi program tersebut merupakan suatu kebutuhan (*need*) yang dapat menjawab masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program kerja.

Sementara itu menurut Jones (1991:296) menyebutkan bahwa:

Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai, tujuan beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mendefinisikan suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan ataupun sebagai pelaksana program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, bahkan program terkadang bisa juga diidentifikasi sebagai anggaran.
- c. Program memiliki identitas tersendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui publik.

Program yang terbaik adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yaitu sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.

Oleh karena itu perumusan program dapat dilakukan dengan menentukan lingkup permasalahan, penentu sasaran, kriteria evaluasi, dan target group, sedangkan sasaran dan kriteria evaluasi harus berorientasi pada target group serta mempertimbangkan kemungkinan adanya dampak yang tidak diinginkan. Untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan terhadap program, Kasim (1992:2) menyatakan ada 4 pendekatan utama, yaitu:

- a. *Program Budgeting (PPBS)*
 - 1) Berdasarkan *policy analysis* dalam sistem, dimana semua program/kegiatan saling berkaitan.
 - 2) Pengembangan alternatif untuk mencapai tujuan

- 3) Perkiraan biaya dan dampak masing-masing alternatif.
 - 4) Pemilihan alternatif terbaik
- b. *Zero Based Budgeting*
- 1) Setiap unit organisasi mengajukan rencana kegiatan tiap bulan.
 - 2) Paket-paket kegiatan dinilai keuntungan dan kelemahan masing-masing
 - 3) Paket kegiatan dirangkai berdasarkan kepentingannya bagi organisasi secara keseluruhan.
 - 4) Menentukan paket dimana yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak dilaksanakan.
- c. *Manajemen Of Objectives*
- 1) Atasan dan bawahan membahas tujuan (*objective*) bagi setiap bawahan tiap tahun sesuai dengan *objective* yang akan dicapai.
 - 2) Bawahan melaksanakan kesepakatan
 - 3) Atasan dan bawahan mengevaluasi kinerja bawahan dalam pencapaian tujuan organisasi.
- d. *Incrementalism*
- 1) Unit-unit diminta untuk mengajukan permintaan anggaran dengan jumlah sama dengan anggaran terdahulu namun bisa juga jumlah yang diajukan kurang dan bisa juga lebih dari anggaran sebelumnya.
 - 2) Manajemen menentukan, memilih berdasarkan perkiraan sumber daya yang ada.

3. Implementasi Pelaksanaan Program.

Implementasi kebijakan suatu program merupakan tahap yang krusial dalam proses pelaksanaan program. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik kedalam mekanisme prosedur secara rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kegiatan. Lester dan Stewart (2000) dalam Winarno (2007:144) mengemukakan bahwa implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapannya. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan perundang-undangan dimana berbagai aktor, organisasi,

prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan program-program.

Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah program dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Dwidjowijoto (2008:432) bahwa dalam proses implementasi, ada dua langkah pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjas atau anggaran sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepada Dinas, dan lain-lain.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu hasil (*outcomes*). Sebagai suatu proses, implementasi dapat dilihat sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan kebijakan bisa dijalankan. Dalam konteks keluaran, implementasi melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang dapat direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat belanja anggaran untuk suatu program. Pada tingkat abstraksi yang tertinggi, hasil implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur setelah kebijakan atau program diluncurkan.

Van Mater dan Van Horn (1975) (dalam Budi Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Menurutnya terdapat enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b. Sumber Daya
- c. Karakteristik Agen Pelaksana
- d. Sikap/Kecendrungan (disposition) para pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas para pelaksana
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Van Mater dan Van Horn (dalam Winarno 2007:148) mengemukakan bahwa suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh hasil substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Namun demikian, Wahab (1997:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Selain itu terdapat kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan

terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuatan kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai.

Hasil penelitian *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) melaporkan pentingnya implementasi kebijakan publik sebagaimana dikutip oleh Ismanto (dalam Tjokroamidjojo, 1995:449), bahwa:

Implementasi kebijaksanaan lebih-lebih di negara yang berkembang tidak hanya sekedar persoalan teknis administratif yaitu menterjemahkan suatu kebijakan kedalam program-program yang lebih spesifik, tetapi proses implementasi juga merupakan proses yang pelik yang sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan (*content of implementation*).

Edward III (1980:9-10) berpendapat ada 4 variabel penentu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif. Keempat variabel tersebut secara simultan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan implementasi kebijakan. Tentang keempat variabel yang saling berhubungan dan berpengaruh dalam implementasi kebijakan, Edward III (1980:10-12) mengemukakan yaitu:

- a. Komunikasi; berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pada pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk

mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Menurut Arifin (2005:5) komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, ketrampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Elliot Jaques mendefinisikan komunikasi sebagai penyampaian berbagai macam perasaan, sikap dan kehendak baik secara langsung maupun tidak langsung, sadar atau tidak sadar. Menurut Wursanto (2002:155), komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian. Menurutnya ada dua pengertian yang terkandung di dalamnya yaitu proses dan informasi. Proses komunikasi merupakan rangkaian dari langkah-langkah yang harus dilalui dalam pengiriman informasi. Informasi adalah segenap rangkaian perkataan, kalimat, gambar, kode atau tanda tertulis lainnya yang mengandung pengertian, buah pikiran atau pengetahuan apapun yang dapat dipergunakan setiap orang yang mempergunakannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, benar dan tepat. Bagi suatu organisasi komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi.

- b. Sumber daya; sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan sangat diperlukan karena tanpa adanya sumber daya sangat mustahil sebuah kebijakan dapat diimplementasikan. Sumber daya yang

dimaksud yaitu sumber daya manusia, kewenangan, informasi serta sarana dan prasarana. Sumber daya menjamin dukungan efektivitas implementasi kebijakan.

- 1) Sumber daya manusia; Sumber daya manusia merupakan aktor yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003:9) sumber daya manusia adalah potensi manusia yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi fisik dan non fisik. Potensi fisik kemampuan fisik yang terakumulasi pada seorang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah kemampuan seseorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, intelegensi, keahlian, keterampilan dan hubungan personal. Efektifitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.
- 2) Informasi; informasi adalah suatu sumber daya kedua yang penting di dalam implementasi kebijakan. Informasi penting untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan suatu kebijakan. Aktor implementasi harus mengetahui apa yang harus dilakukan ketika manerima perintah untuk melaksanakan kegiatan atau kebijakan. Oleh karena itu informasi yang disampaikan atau diterima harus jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kegiatan atau kebijakan.
- 3) Kewenangan; Menurut Iwastha (2000:114), wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan

orang lain dan hak untuk memberikan perintah. Sementara itu Henry Fayol (dalam Sabardi, 1997: 106) menyebutkan wewenang sebagai kebenaran untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk memastikan ketaatan. Dengan kewenangan berkaitan dengan hak atau kekuasaan untuk menjalankan kegiatan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

- 4) Sarana dan prasarana; Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam menunjang atau membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana pada suatu organisasi, maka setiap kegiatan yang dijalankan oleh para pekerja akan lebih mudah dan cepat.
- c. Disposisi atau sikap; berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Sikap seseorang terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan (Wexley dan Yuki, 2003:129). Sikap adalah cara seseorang memandang sesuatu secara mental (Atmosoeparapto, 2002:11). Temuan penelitian *Harvard School of Business*

menyebut bahwa 85% faktor penentu keberhasilan adalah sikap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kunci keberhasilan kegiatan atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

- d. Struktur birokrasi; berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadi proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dari para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi. Dwidjowijoto (2008:447) menyatakan bahwa di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan atau pemerintah. Menurut Edward III (1980:25) ada 2 indikator penting dalam struktur organisasi yaitu standar operasi prosedur dan fragmentasi organisasi. Standar operasi prosedur sebaiknya dibuat secara sederhana namun tetap tidak mengurangi makna sehingga tidak menyulitkan aparat pelaksana. Standar operasi prosedur merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Dengan menggunakan

standar operasi prosedur, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dengan efisien. Fragmentasi organisasi adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas sehingga tidak tumpang tindih (duplikasi) dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh. Fragmentasi organisasi terutama berasal dari tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi, seperti legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, peraturan-peraturan dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi (Edward III, 1980:135). Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi erat kaitannya dengan struktur organisasi yang mengimplementasi kebijakan. Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1996:29-30) struktur organisasi terdiri dari hubungan pekerjaan dan kelompok pekerjaan yang relatif tetap dan stabil. Tujuan utama struktur organisasi adalah untuk mempengaruhi perilaku individu dan kelompok sehingga dapat mencapai prestasi yang efektif. Keputusan manajerial yang penting untuk menentukan struktur organisasi adalah pembagian kerja. Pendelegasian wewenang, departementasi pekerjaan menjadi kelompok-kelompok, dan penentuan renteng kendali. Keempat keputusan penting itu saling berhubungan dan saling bergantung, meskipun masing-masing mengandung masalah khusus tertentu yang dipandang terpisah satu sama lain.

Grindle (1991:5) menyatakan bahwa ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan

(*content of policy*) dan konteks dari implementasi itu sendiri (*context of implementation*) dan konteks dari implementasi itu sendiri (*context of implementation*). Isi kebijakan meliputi: (1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan (*Interest affected*); yang berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan (*Type of benefit*); pada hal ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan, (3) derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*); seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas; (4) kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*); pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan maka harus dijelaskan di mana letak pengambil keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) siapa pelaksana kebijakan (*program implementer*); dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan tersebut, dan (6) sumber daya yang dikerahkan atau yang dilibatkan (*resources committed*), pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sedangkan

konteks implementasi kebijakan (*context of policy implementation*) meliputi: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actors involved*); dalam implementasi suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya implementasi kebijakan, (2) karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*); lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, dan (3) kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*); yaitu kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana.

Menurut Islamy (1992) menyebutkan bahwa tahap-tahap implementasi kebijakan adalah:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat non self-executing, yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai (hal. 102-106)

Apabila dilihat dari pendapat Islami tersebut diatas maka implementasi program pemberdayaan usaha kecil dan menengah pada pemerintah kota Batam ini termasuk kebijakan yang bersifat non self-executing, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak agar tujuan dari program ini dapat tercapai.

5. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan hakikat dari *power* atau daya yang dimiliki oleh individu, serta hubungan antar individu atau dan atau antar lapisan sosial yang lain. Menurut Onny S. Prijono & A. M.W. Pranarka (1996:135) :

Pemberdayaan merupakan proses pematihan atau *breakdown* dari hubungan atau relasi antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Proses ini melihat pentingnya aliran daya (*flow of power*) atau pemberian kuasa, kebebasan dan pengakuan dari subjek ke objek.

Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subjek, sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antar subjek dengan subjek yang lain. "Pemberdayaan berkaitan dengan dua dimensi dari daya itu, yaitu dimensi distributif yang menghambat pemberdayaan, serta dimensi generatif yang cenderung pemberdayaan" (Dahl, 1973; Hulme & Turner, 1990: 214-215; Mas'ood, 1994: 100-101).

Ditinjau dalam dimensi distributif daya bersifat zerosum dan sangat kompetitif. Sebaliknya pada sisi dimensi generatif daya dapat bersifat positif sum, artinya pemberian daya pada pihak lain dapat meningkatkan daya diri sendiri.

Menurut Friedmann (1993: 113) : Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Tetapi karena proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau

hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu senasib untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha kecil dan menengah pasal 5 menyebutkan tujuan pemberdayaan usaha kecil dan menengah adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

6. Evaluasi Program

Kata evaluasi dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai padanan dari kata penilaian yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menikahi suatu objek, keadaan, peristiwa, atau suatu kegiatan tertentu yang sedang diamati (Mardikanto, 1993). Evaluasi merupakan suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif (Tayibnapi, 2000).

Evaluasi program merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draft/usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Selain evaluasi tentang bagaimana proses

perumusan program juga dievaluasi tentang semua unsur program, yang menyangkut pengumpulan informasi (data, fakta), analisis keadaan, perumusan masalah, tujuan dan cara-cara mencapai tujuan yang menyangkut kegiatan yang akan dilaksanakan, metode yang diterapkan, sasaran kegiatan, volume kegiatan, tempat/lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta jumlah dan sumber dana yang akan dipergunakan. Menurut Rossi (dalam Mardikanto;1993) kegiatan evaluasi sangat penting terhadap:

- a. Siapa (kelompok) sasaran program, dimana lokasinya, dan bagaimana spesifikasi kelompok sasaran program tersebut?
- b. Apa metode terbaik yang akan diterapkan demi tercapainya tujuan yang diinginkan?
- c. Apakah program tersebut benar-benar kondisten dengan tujuan yang diinginkan?
- d. Seberapa jauh peluang keberhasilan program yang akan dilaksanakan?

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi program dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Pengertian evaluasi menurut Stufflebeam yang dikutip oleh Ansyar (1989) bahwa evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan.

Selanjutnya *The joint committee on Standards For Educational Evaluation (1994)* , mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang keberhasilan suatu tujuan. Sedangkan Djaali, Mulyono dan Ramli (2000) mendefinisikan bahwa Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi.

Rutman and Mowbray 1983, mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan *outcomes* suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Chelimsky (1989), mendefinisikan evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program.

Wirawan (2006) Evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program.

Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan. Alasannya adalah dengan masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan.

Evaluasi program adalah aplikasi dari metode penelitian secara sistematis untuk keperluan penilaian desain program, implementasi, dan efektifitasnya. Evaluasi program dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan program dan dampaknya terhadap

masyarakat umum dan terhadap individu. Evaluasi program pada tahap *policy formulation* bertujuan untuk melakukan penilaian dan justifikasi terhadap kebutuhan program baru, sementara itu pada tahap *policy execution* bertujuan untuk mengetahui apakah program dilaksanakan dengan cara yang paling *cost-effective*, sedangkan pada tahap *Accountability* bertujuan untuk mengetahui apakah operasi pelaksanaan program cukup efektif dan apakah perlu program tersebut dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan. Ada lima teknik evaluasi, yaitu:

- a. Perbandingan kondisi sebelum dengan kondisi sesudah adanya program.
- b. Perbandingan tren proyeksi sebelum program dengan data sesudah adanya program.
- c. Perbandingan populasi sasaran dengan populasi yang tidak menjadi sasaran program.
- d. Eksperimen yang terkontrol dimana ada dua kelompok yang mempunyai ciri-ciri yang serupa. Kelompok yang satu dilayani oleh program sedangkan kelompok yang lain tidak dilayani.
- e. Perbandingan antara hasil menurut rencana dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan

produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Untuk keperluan jangka panjang atau untuk kepentingan berkelanjutan (*sustainable*) suatu program, evaluasi sangat diperlukan. Dengan evaluasi, kebijakan-kebijakan kedepan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut ini diberikan beberapa argumen perlunya evaluasi, yaitu :

- a. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni beberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan.
- b. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektifitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
- c. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
- d. Menunjukkan pada *stakeholders* manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat suatu kebijakan atau program.

e. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Sedangkan Jones (dalam Tangkilisan, 2003;25) mengemukakan bahwa evaluasi suatu kebijakan publik berarti dilakukan peninjauan ulang untuk mendapatkan perbaikan dari tempat yang tidak diinginkan. Selanjutnya Ripley (dalam Tangkilisan, 2003;26) mengemukakan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap suatu tindakan kebijakan sesungguhnya merupakan evaluasi terhadap proses implementasinya, kemudian bagaimana kepatuhan dari kelompok-kelompok ketika proses implementasi berlangsung dan terakhir bagaimana prospek ke depan dari dampak kebijakan tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003 : 28) secara umum evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator utama yaitu indikator input, proses, output dan outcomes. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input ini dapat meliputi sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur pendukung lainnya.

Sedangkan menurut George Edward (dalam Tangkilisan 2003 ; 55) menyebutkan bahwa sumber daya ini terdiri dari : Staf, jumlah yang cukup dan memiliki kemampuan yang baik untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan (berhubungan dengan sumber daya manusia). Informasi, baik yang menjelaskan bagaimana para implementor

melakukan kebijakan, karena implementor juga perlu tahu apa yang harus dikerjakan ketika diberikan petunjuk untuk bertindak. Fasilitas yang mendukung guna menjalankan sebuah program.

Sedangkan indikator proses menfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Efektivitas menurut Dunn (2000 : 610) dalam Evaluasi harus dapat menjawab apakah hasil yang diinginkan telah tercapai atau tidak. Efektifitas ini berkenaan dengan apakah hasil yang diharapkan tercapai atau tidak.

Melihat beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah tahapan yang dilakukan setelah suatu program dilaksanakan dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

7. Usaha Kecil dan Menengah.

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), kelompok perusahaan yang dimiliki penduduk Indonesia dengan jumlah nilai asset kurang dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diluar nilai tanah dan bangunan yang digunakannya. Menurut Impres nomor 10 tahun 1999 usaha kecil dan menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Menurut Gaedeke dan Toolelian (1991) terdapat empat aspek yang digunakan dalam konsep Usaha kecil dan menengah yaitu:

- a. Kepemilikan
- b. Operasinya terbatas pada lingkungan atau kumpulan permodalan
- c. Wilayah operasinya terbatas pada lingkungan sekitarnya, dan pemasaran usahanya hanya pada wilayah lokalnya saja.

Sedangkan menurut Kamar Dagang Indonesia (Kadin), usaha kecil yang modal kerjanya kurang dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila dilihat dari jumlah pekerja Badan Pusat Statistik (BPS) membagi usaha kecil dan menengah adalah usaha dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang termasuk pemiliknya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1987 dapat disimpulkan bahwa profil Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia adalah:

- a. Hampir setengah dari perusahaan kecil dan menengah hanya mempergunakan kapasitas usaha sebesar 60% atau kurang.
- b. Lebih dari setengah perusahaan kecil dan menengah didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan.
- c. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh usaha kecil dan menengah adalah masalah permodalan, izin usaha, pemasaran, hubungan usaha dan peningkatan kualitas produk.
- d. Usaha menurun karena kurang modal, kurang mampu memasarkan dan kurangnya keterampilan teknis dan administrasi para pemilik usaha.
- e. Lebih mengharapkan bantuan dari pemerintah mulai dari modal, pengadaan barang hingga pemasarannya.

Secara umum UKM bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang perdagangan barang dan jasa. Menurut Keppres No. 127 Tahun 2001 adapun bidang/jenis usaha yang dibuka bagi usaha kecil dan menengah dibidang industri dan perdagangan adalah:

- a. Industri makanan dan minuman olahan yang dilakukan pengawetan dengan proses pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan dan fermentasi dengan cara-cara tradisional.
- b. Industri penyempurnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat dengan menggunakan alat yang digunakan oleh tangan.
- c. Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, perbatikan, dan pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATBM, atau alat yang digerakkan oleh tangan termasuk batik, peci, kopiah, dsb.
- d. Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan pangan, yaitu:
 - Bahan banunan atau rumah tangga, bambu, nipah, sirap, arang, sabut.
 - Bahan industri seperti getah, kulit kayu, sutra alam, gambir.
- e. Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.
- f. Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, permanen, secara panen dan pengelolaan, kecuali cangkul dan sekop.
- g. Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir maupun yang tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.
- h. Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal dibawah 30 GT, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual dan semi otomatis.
- i. Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi.
- j. Perdagangan dengan skala kecil dan informasi.

8. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Berkaitan dengan regulasi tentang pembinaan dan pemberdayaan UKM tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa : Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1998 Pasal 2 menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Pasal 5 menyebutkan Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
- b. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
- c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
- d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil. (Depkop, 2006: 1-3)

Pemberdayaan UKM menghadapi kendala berupa rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya produktivitas serta daya saing UKM. Kendala itu mempengaruhi kemampuannya dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha dan ini menjadi salah satu tanggung jawab

dari pemerintah daerah untuk secara ikhlas dan rela memberdayakan UKM dengan benar-benar memberikan daya yang dimilikinya sehingga nantinya akan menjadi subjek yang mampu menganalisa permasalahannya, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatannya, baik secara individu maupun kelompok. Bentuk hubungan atau relasi dari subjek ke objek mampu berubah menjadi hubungan atau relasi dari subjek ke subjek.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 18 menyatakan bahwa Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang Pemasaran, yang dilakukan dengan cara:

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. Menyebarkan informasi pasar;
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan kecil;
- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Selanjutnya dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Pasal 7 huruf (h) dijelaskan “Pemberian peluang pasar kepada usaha kecil perlu terus ditingkatkan oleh pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat, sehingga usaha kecil dapat memanfaatkan pasar dan akses pasar”.

Peluang pasar dan akses pasar adalah suatu hal yang menjadi kajian dari ilmu pemasaran. Hal tersebut oleh Pemerintah Daerah secara terus menerus harus selalu diteliti dan dikaji sehingga akan memunculkan suatu kebijakan yang selalu berimpitan dengan kebutuhan UKM. Konsep inti pemasaran adalah pertukaran (exchange), alasannya yaitu bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh individu dengan individu lain merupakan pertukaran (Bagozzi: 1975; Alderson: 1957; Hunt: 1976; Kotler: 1984b; Houston & Gassenheimer: 1987; Sutisna, 2003:264). Tidak ada seorang individu pun yang mendapatkan sesuatu tanpa memberikan sesuatu langsung maupun tidak langsung. Alasan terjadinya pertukaran adalah untuk memuaskan kebutuhan.

B. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan tentang bagaimana evaluasi kebijakan yang telah diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar Koperasi dan UKM Kota Batam, khususnya dalam pemberdayaan Usaha kecil dan menengah yang ada dikota Batam. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tangkilisan yang menyebutkan evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator yaitu input, proses, output serta outcome. Indikator input ini memfokuskan pada sumber daya kebijakan. George Edward III menyebutkan unsur sumber daya meliputi adanya sumber daya manusia dan informasi tentang suatu kebijakan. Kedua konsep teori tersebut digunakan untuk melihat bagaimana evaluasi kebijakan

program pemberdayaan usaha kecil dan menengah pada pemerintah kota Batam.

Menurut Yoki Kuncoro ada 3 (tiga) aspek utama yang perlu diperhatikan dalam implementasi pengelolaan dan pengetahuan UKM, yaitu :

1. Eksplorasi, yaitu melakukan pemetaan dalam organisasi mengenai *knowledge* yang dimiliki oleh setiap divisi, baik yang berhubungan dengan sumber daya manusia, produk, pasar maupun pelanggan. Dengan begitu, maka akan mudah dilakukan proses pencarian dan pengumpulan seluruh pengetahuan yang dimiliki perusahaan maupun pengetahuan yang dikuasai oleh tiap pegawai;
2. Proses pembelajaran, pada tahap ini dilakukan cara memanfaatkan pengetahuan tersebut secara maksimal. Bisa dengan pertukaran individu maupun secara perorangan. Atau dilakukan melalui forum interaktif untuk berbagi pengetahuan secara online (internet, blog). Pada tahapan ini, akan tercipta budaya pembelajaran yang semakin lama semakin kuat. Kenapa ? Karena pada dasarnya setiap orang haus akan informasi dan pengetahuan. Akibatnya, perusahaan pun akan semakin kaya akan orang-orang yang kuat pengetahuannya;
3. Proses mencari dan menciptakan pengetahuan baru, tahap ini akan terjadi bila telah terjadi budaya pembelajaran yang kuat dalam perusahaan. Dan juga, kumpulan *knowledge* yang sebelumnya dimiliki perusahaan dalam sistem *knowledge management* tidak lagi mencukupi. Sehingga, tiap orang dalam perusahaan akan berusaha untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang baru. Alhasil, kumpulan pengetahuan dalam sistem

knowledge management menjadi terus berkembang yang pada akhirnya akan menjadi sumber pengetahuan perusahaan yang lengkap dan *update* atau terus diperbaharui.

Hasil penelitian ini adalah berupa laporan deskriptif tentang Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Pemerintah Kota Batam.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat terlihat pada gambar berikut ini:



C. Defenisi Operasional

Untuk mencapai hasil penelitian yang baik secara empiris dilapangan, maka sejumlah konsep teori yang masih abstrak masih diperlukan untuk dioperasionalisasikan agar benar-benar menyentuh fenomena-fenomena yang akan diteliti serta memudahkan untuk melakukan pengukuran. Defenisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel II.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Defenisi Operasional

Variabel	Sub Indikator	Sumber Data	
		Primer	Sekunder
1. Komunikasi	a. Kejelasan informasi mengenai sasaran dan tujuan kebijakan program pemberdayaan UKM. b. Pemahaman Terhadap Program. c. Koordinasi antar bagian/seksi yang menangani program pemberdayaan UKM	Wawancara	Laporan-laporan, Perda dan Keputusan Walikota
2. Sumber Daya	a. Staff yang berkompeten guna menjalankan program pemberdayaan UKM b. Sumber Daya Financial untuk menjalankan program pemberdayaan UKM c. Sarana dan prasarana pendukung untuk menjalankan program pemberdayaan UKM	Wawancara	Data Kepegawaian

Kemudian untuk melihat tanggapan responden kelompok pelaku UKM yang ada di Kota Batam, peneliti menurunkan indikator-indikator sesuai

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan tingkat kedalaman pemahaman terhadap objek penelitian termasuk penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan-kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar Koperasi dan UKM Kota Batam. Menurut Ndraha (dalam Widodo dan Mukhtar, 2000: 15), metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Menurut Bayle, penelitian deskriptif selain mendeskripsikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang bagaimana fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang disoroti dari sudut "kemengapaan" dan "kebagaimanaanya" tentang suatu yang terjadi.

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah kekuatan atau keunggulan metode deskriptif. Keunggulan metode deskriptif antara lain: melukiskan keadaan suatu objek pada suatu saat tertentu, mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala dari suatu peristiwa, menemukan data yang menunjukkan tampilan dari suatu realitas, dan menunjukkan realisasi suatu gagasan/ide atau peraturan (Widodo dan Mukhtar, 2000:19). Metode penelitian ini adalah survey yang bersifat deskriptif dengan menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Selain itu juga dilakukan observasi, dan pengkajian dokumen untuk melengkapi data dan fakta yang diperlukan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diamati. Objek yang diamati dapat berupa benda hidup maupun benda mati, dimana sifat-sifat yang ada dalam objek tersebut dapat diukur atau diamati. Populasi terdapat dua bagian yaitu ada populasi yang tak terbatas dan populasi yang dapat diketahui jumlahnya. Menurut Sugiono (2002 : 57) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini dilakukan di kota Batam khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Batam yang salah satu tugasnya adalah pemberdayaan Usaha kecil dan menengah yang ada dikota Batam. Untuk melihat jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang ada dikota Batam dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Batam

No.	Uraian	Tahun	
		2008	2009
1.	USAHA MIKRO		
	1. Jumlah (unit)	2.148	2.232
	2. Omzet (Rp. 0, s/d 300.000.000,- /Th)	Rp. 828,6 M	Rp. 1.030 M
	3. Modal	Rp. 207,2 M	Rp. 213 M
	4. Jumlah Karyawan (Orang)	8.300	8.520
2.	USAHA KECIL		
	1. Jumlah (unit)	81	103
	2. Omzet (Rp. 300 Juta s/d 2,5M/Th)	Rp. 148 M	Rp. 168 M
	3. Modal	Rp. 119,4 M	Rp. 122,7 M
	4. Jumlah Karyawan (Orang)	2.145	1.503

3.	USAHA MENENGAH		
	1. Jumlah (unit)	63	86
	2. Omzet (Rp. 2,5M s/d 50M,-/Th)	Rp. 2.4 T	Rp. 2.75 T
	3. Modal	Rp. 1,2 T	Rp. 1,5 T
	4. Jumlah Karyawan (Orang)	1.225	1.526

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam, Tahun 2010.

Mengingat penelitian ini di kota Batam, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha kecil dan menengah yang berdasarkan pada tabel III.1 diatas berjumlah 752 unit usaha.

Sedangkan sampel penelitian menurut Sugiono (2002 : 57) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini sampel ditentukan dengan teknik *Random Sampling* (secara acak) dari jumlah populasi. Untuk mengatasi keterbatasan waktu penelitian maka penentuan sampel adalah dengan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

E = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir.

$$N = \frac{n}{1 - n(e)^2}$$

$$n = \frac{189}{1 + (189 \times (10\%)^2)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{189}{1 + (189 \times 0.01)} \\ &= \frac{189}{1 + 1.89} \\ &= \frac{189}{2.89} \\ &= \mathbf{65.39 \text{ (Jumlah Sampel)}} \end{aligned}$$

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengelola dan menginterpretasikan informasi daripada responden yang dilakukan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Batam khususnya dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Wawancara digunakan sebagai salah satu instrumen penelitian untuk mengarahkan agar proses wawancara informan kunci yang telah ditentukan dapat terfokus pada permasalahan yang akan diteliti. Teknik ini digunakan karena wawancara mempunyai sejumlah kelebihan, yaitu dapat digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat mendapat informasi yang dibutuhkan, lebih meyakinkan peneliti bahwa responden menafsirkan pertanyaan dengan benar, memberikan kemungkinan besar atas keluwesan

dalam proses pengajuan pertanyaan, banyak pengendalian yang dapat dilatih dalam konteks pertanyaan yang diajukan dalam jawaban yang diterikan, informasi dapat lebih siap diperiksa kesahihannya atas dasar isyarat non verbal (Black & Champion, 1992:51). Dalam hal ini penulis hanya mengikuti pedoman wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat dilakukan wawancara sehingga diharapkan akan diperoleh informasi yang lengkap, aktual dan akurat sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan pihak yang diwawancarai (*key informan*) adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Batam

2. Kuesioner, yaitu kegiatan tanya jawab secara langsung dan tertulis kepada responden. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian ini untuk mengetahui respon/penilaian responden terhadap kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Batam khususnya dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kebijakan selanjutnya diturunkan menjadi program-program, yang kemudian diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini kemudian diolah menjadi pertanyaan/pertanyaan yang diajukan kepada responden. Alat yang digunakan adalah angket yaitu alat dalam pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang peneliti berikan kepada responden dilengkapi dengan alternatif jawaban, jadi setiap responden hanya menjawab salah satu kategori jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan. Hasil dari wawancara dengan informan kunci kemudian

dibandingkan dengan jawaban dari responden yang mengisi angket ini. Responden yang mengisi angket ini adalah para pelaku UKM yang ada di kota Batam yang berjumlah 75 orang responden.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu Pengumpulan Data Primer dan Pengumpulan Data Sekunder.

1. Pengumpulan Data Primer

Data primer yang bersifat kualitatif, diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara kepada responden yang telah ditentukan dan yang mewakili pihak-pihak yang terkait pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di kota Batam. Responden tersebut memiliki pengetahuan dan kompetensi pada bidang yang dikaji atau terkena dampak terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan atau mempunyai kepentingan dalam hal yang dikaji.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi. Penulis mengkaji laporan-laporan statistik dan program/kegiatan mengenai pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah (UKM) di kota Batam. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi diperlukan sebagai bahan acuan referensi dan data awal dalam melakukan wawancara. Artinya dari data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang ada, penulis berupaya untuk melakukan penelusuran lebih lanjut dengan tentang fenomena apa yang terjadi dalam data yang ada ini melalui observasi dan wawancara. Data yang didapatkan dari dokumen. Dokumen tersebut meliputi laporan dan atau berbagai artikel, majalah, koran atau jurnal yang relevan dengan tema

penelitian ini juga digunakan sebagai bahan pembandingan dengan informasi yang didapat dari observasi dan wawancara.

F. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deksriptif. Analisis deskriptif digunakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menilai tingkat penerimaan/persepsi responden dalam kegiatan pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah (UKM) di kota Batam yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Batam, penilaian digunakan dengan skala *likert*. Skala *likert* menurut Sugiono (2003:107) dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini skala *likert* tersebut dibuat dengan skala 5 tingkat yang terdiri dari Sangat tidak setuju, Tidak Setuju, Ragu-ragu, Setuju, dan Sangat Setuju. Kelima penilaian tersebut diberikan bobot sebagaimana pada tabel III. 2 berikut ini:

Tabel 3.2

Bobot tingkat Penerimaan/Persetujuan

Jawaban Responden	Bobot Nilai
Sangat tidak setuju	1
Tidak Setuju	2
Ragu-ragu	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Keuntungan menggunakan skala likert dalam penelitian ini adalah bahwa memungkinkan responden dapat lebih jelas menyatakan derajat pendapat mereka atas pelayanan yang mereka terima, lebih dari sekedar jawaban Ya atau Tidak (Gusmali, 1994:38). Dengan perkataan lain, skala likert dipergunakan untuk memungkinkan responden memberikan jawaban dalam berbagai tingkatan jawaban.

Selanjutnya setelah dilakukan tabulasi data, maka dilakukan analisa deskriptif yaitu dengan menyajikan hasil tanggapan responden mengenai pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah (UKM) di kota Batam yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Batam.

G. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data dan kegiatan penelitian selanjutnya dilakukan kegiatan menganalisa data. Kegiatan analisa data ini terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang antara lain : (1) pengecekan nama dan kelengkapan identitas, (2) pemeriksaan isi instrumen data, (3) pengecekan isian data.

2. Tahap Tabulasi Kegiatan

Tahap Tabulasi Kegiatan adalah kegiatan mengelompokkan data ke dalam tabel frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa. Kegiatan tabulasi dalam hal ini yaitu :

- a. *Coding*, yaitu pembahasan kode untuk setiap data yang telah diedit.

- b. *Skoring*, yaitu pemberian skor terhadap jawaban responden untuk memperoleh data yang kuantitatif yang diperlukan. Pada penelitian ini menggunakan Skala Linkert untuk menentukan skor. Masing-masing jawaban diberi nilai skor 1 sampai 5.

3. Tahap Penerapan Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dengan menggunakan teknik tabulasi, dengan menyajikan hasil penelitian tabel-tabel distribusi frekuensi dengan persentase.

Sedangkan analisa kualitatif digunakan untuk menentukan variabel-variabel yang akan dijadikan acuan dalam menentukan tingkat kepuasan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Batam.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Natuna. Berdasarkan perhitungan dari Bakosurtanal, Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas wilayah 425.214,676 km², yang terdiri dari 9.982,88 km² berupa daratan dan 415.231,79 km² berupa lautan. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau, dimana 385 pulau telah berpenghuni. Namun demikian baru 1.795 pulau yang diakui, termasuk di dalamnya 19 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sedangkan 613 pulau sisanya masih dalam proses penetapan di PBB.

Sebagai provinsi yang masih baru, Provinsi Kepulauan Riau terus berkembang dan melakukan pemekaran wilayah. Hingga tahun 2008, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, yakni Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam.

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada lokasi yang sangat strategis yakni berada di wilayah perbatasan antar negara, bertetangga dengan salah satu pusat bisnis dunia (Singapura) serta didukung oleh adanya jaringan

transportasi laut internasional dengan lalu lintas yang ramai. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara $0^{\circ}40'$ LS dan $07^{\circ}19'$ LU serta antara $103^{\circ}3'$ - $110^{\circ}00'$ BT, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja

Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang letak satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan perairan. Beberapa pulau yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan dimana lokasi kedudukan Ibukota Provinsi (Tanjungpinang), Pulau Batam yang merupakan Pusat Pengembangan Industri dan Perdagangan, Pulau Rempang, dan Galang yang merupakan kawasan perluasan wilayah industri Batam, Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Lingga, Pulau Bunguran di Natuna, serta Gugusan Pulau Anambas. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau memiliki pulau-pulau kecil yang hampir tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada, termasuk diantaranya pulau-pulau kecil yang terletak di wilayah perbatasan Negara Indonesia. Keberadaan pulau-pulau terluar ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat memiliki kerentanan terhadap masalah keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai wilayah administrasi termuda, Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap ekonomi Pulau Sumatera, dibandingkan dengan provinsi lain yang telah berkembang lama. Sampai dengan tahun 2008, skala ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang tercermin

pada PDRB mencapai Rp 37.021,00 milyar (dengan migas) dan Rp 35.314,00 milyar (tanpa migas) memberikan kontribusi terhadap ekonomi Pulau Sumatera sebesar 8,50% (Dengan Migas) dan 9,57% (Tanpa Migas), cenderung meningkat dibandingkan pada awal pembentukan provinsi ini pada tahun 2003. Besaran skala ekonomi tersebut menempatkan Provinsi Kepulauan Riau pada posisi ke lima di antara tingkat ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

Struktur ekonomi wilayah Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh sektor industri, sebagai penggerak ekonomi wilayah dengan nilai tambah yang dihasilkan sampai tahun 2008 memberikan kontribusi 51,48%. Sumbangan ini dipengaruhi oleh kegiatan industri yang terpusat di Kota Batam sebagai kawasan industri. Sektor perikanan yang mempunyai potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang sangat besar namun belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap ekonomi wilayah. Sampai tahun 2008, nilai tambah yang dihasilkan dari sektor ini hanya memberikan kontribusi 3,36%, jauh lebih rendah dibandingkan kontribusi sektor industri. Sektor perdagangan juga memberikan peranan yang cukup berarti, sampai tahun 2008, kontribusi terhadap ekonomi wilayah mencapai 22,44% sedikit meningkat dibandingkan tahun 2003. Perkembangan sektor perdagangan merupakan turunan dari pertumbuhan sektor industri yang sebagian besar produknya ditujukan untuk pasar ekspor

Sebaran kegiatan ekonomi menunjukkan kegiatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau terkonsentrasi di Kota Batam. Kegiatan ekonomi yang dihasilkan Kota Batam memberikan sumbangan terhadap ekonomi Provinsi

Kepulauan Riau sebesar 71,77%. Sementara itu kabupaten lain hanya memberikan sumbangan kurang dari 10% terhadap ekonomi Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Konfigurasi fisik wilayah berupa pulau-pulau kecil dan didominasi oleh lautan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan tersebut. Faktor lainnya yang merupakan faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Kota Batam sebagai kawasan industri yang diikuti dengan kebijakan investasi yang bersifat insentif.

Secara sektoral sebaran kegiatan ekonomi menunjukkan sektor sekunder dan tersier terkonsentrasi di Kota Batam. Nilai tambah yang dihasilkan sektor industri di Kota Batam memberikan kontribusi sebesar 86,96% terhadap pembentukan sektor industri Provinsi Riau. Perkembangan sektor industri dan dukungan prasarana sarana ekonomi dan pengangkutan membangkitkan perkembangan sektor sekunder dan tersier. Sektor-sektor sekunder dan tersier di Kota Batam memberikan kontribusi antara 40%-86% terhadap pembentukan nilai tambah sektor-sektor sekunder dan tersier Provinsi Kepulauan Riau.

Sebaran sektor primer menunjukkan kegiatan pertanian terkonsentrasi di Kabupaten Karimun dan sektor pertambangan di Kabupaten Anambas. Peranan Kabupaten Karimun terhadap pembentukan nilai tambah sektor pertanian di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 32,93%. Peranan Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap pembentukan nilai tambah sektor pertambangan sebesar 80,03%.

Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam.

Kota Batam yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km² atau sekitar 115% dari wilayah Singapura, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.570.35 km². Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat celsius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur. Batas-batas Kota Batam:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Singapura dan Malaysia
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Daik-Lingga
3. Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjungpinang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten karimun.

Sumber : BPS Kota Batam

Batam dengan letak geografisnya yang sangat strategis sebagai salah satu kota di provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional.

Kota ini memiliki jarak yang dekat dengan Singapura dan Malaysia. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, dan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam hingga Januari 2009 Kota Batam telah berpenduduk 965.062 jiwa dan merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga populasinya di Sumatera setelah Medan dan Palembang.

Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam.

Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah kecamatan Batam yang merupakan bagian dari kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam.

Di era Reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam. Batam mempunyai banyak potensi

yang dapat dikembangkan, meliputi objek-objek wisata, seni tradisional, upacara tradisional dan juga industri kerajinan, serta perdagangan yang menjadikan Kota Batam menjadi kondusif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat.

Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Beberapa suku yang dominan adalah suku Melayu, Minang, Batak, Makassar, Jawa, Flores, Tionghoa dan lain-lain. Hingga tahun 2006, Batam telah berpenduduk lebih dari 700.000 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cenderung stabil. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2005 memiliki angka pertumbuhan penduduk rata-rata 6 persen pertahun. Agama islam adalah agama mayoritas di Kota Batam. Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota, berdekatan dengan alun-alun, kantor walikota dan kantor DPRD menjadi simbol masyarakat Batam yang agamis. Agama Kristen dan Katholik juga banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari suku Batak dan Flores. Agama Budha kebanyakan dianut oleh warga Tionghoa.

Hingga Juni 2009, Batam telah berpenduduk kurang lebih 965.062 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2008 memiliki angka pertumbuhan penduduk rata-rata hampir 10 persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor penggerak

ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain.

Keberadaan kegiatan perekonomian di Kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam, hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan. Batam, bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akses menuju Kota Batam dapat ditempuh melalui jalur udara dan laut. Melalui jalur udara, Batam dapat dicapai melalui Bandara Internasional Hang Nadim yang melayani rute penerbangan langsung dari banyak kota di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Padang dll. Batam juga memiliki lima pelabuhan ferry internasional yang menghubungkannya dengan Singapura dan Malaysia: Batam center, Batu Ampar (Harbour Bay), Nongsa, Waterfront City, dan Sekupang.

Konsentrasi pembangunan perekonomian Kota Batam diarahkan pada bidang industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Akibat krisis ekonomi dunia pada awal tahun 1997 pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perlambatan dibanding dengan tahun sebelumnya, dan masih berpengaruh terhadap pertumbuhan pada tahun berikutnya. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Kota Batam telah mengalami perlambatan yang sangat drastis, walaupun masih mampu bertahan tumbuh dengan angka positif. Seiring dengan mulai membaiknya perekonomian nasional secara langsung juga berdampak positif terhadap perekonomian regional khususnya Kota Batam dimana pertumbuhannya mulai menunjukkan peningkatan meskipun belum mampu pulih seperti sebelum terjadinya krisis ekonomi. Untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan kinerja perekonomian Batam dapat dilihat dan dianalisis berdasarkan perkembangan indikator ekonomi antara lain seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per Kapita, pendapatan Regional per Kapita, kontribusi sektoral, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Tenaga Kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan, sehingga untuk mendapatkannya perlu dibekali pendidikan yang berkualitas. Di Kota Batam pencari kerja terbanyak adalah lulusan SLTA, sedangkan pekerja terbanyak adalah dibidang industri tekstil. Tenaga Kerja yang terdapat di daerah ini mempunyai kemampuan untuk mudah menerima inovasi dan memiliki loyalitas yang tinggi, karena telah dibekali dengan berbagai macam pelatihan dan pendidikan.

Kota Batam memiliki potensi dan sumber daya manusia yang menunjang produktivitas pada berbagai sektor perindustrian, baik yang besar, menengah, maupun industri kecil yang menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbagai hal pembangunan, sehingga untuk meningkatkan produktivitas industri diperlukan tenaga kerja yang ahli dan terampil. Hal ini sehubungan untuk meningkatkan hasil produksi yang berkualitas ekspor.

Kota Batam, masih memiliki kawasan untuk mengembangkan potensi dan mengembangkan sentra industri yang tersebar di beberapa daerah produktif di Kota Batam, sebagian daerah sudah terealisasi pembangunannya dan siap menampung sejumlah besar investor PMDN dan PMA.

Kota Batam terkenal dengan nama sebutan Kota Tekstil karena lebih dari sepuluh perusahaan besar dan menengah bergerak di bidang tekstil. Sentra industri ini telah menampung sekitar 61.300 orang tenaga kerja dengan jumlah produksi 371.000.000 meter pertahun, dan telah diekspor ke berbagai negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia.

Kota Batam juga sebagai daerah wisata. Pada tahun 2010 Kota Batam menggelar tahun kunjungan wisata bertajuk VISIT BATAM 2010 - Experience it. Didukung oleh fasilitas hotel dan resort berstandar internasional serta aneka kegiatan wisata yang disusun dalam Kalender Kegiatan Kepariwisata Kota Batan, diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara saat berkunjung ke Kota Batam.

Tempat-tempat wisata unggulan di Batam seperti Jembatan Bareleng (Ikon Kota Batam), Bekas kamp pengungsi Vietnam di pulau Galang, Pantai Nongsa, Pantai Melur Pulau Galang, Pantai Sekilak, KTM Resort (terdapat patung Dewi Kwan-Im raksasa), Berbagai resort berstandar internasional yang menyediakan fasilitas hotel, golf dll. Untuk tempat-tempat wisata belanja tersedia lokasi seperti komplek Nagoya, komplek jodoh, Mega Mall, Nagoya Hill Mall, Batam City Square(BCS) Mall, Lucky Plaza (Pusat penjualan handphone, Mymart (Pusat penjualan Komputer).

B. Identifikasi Responden

Pada bagian ini bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program pemberdayaan usaha kecil dan menengah pada Pemerintah kota Batam dan dalam pembuktiannya diadakan penelitian terhadap 65 (enam puluh lima) responden. Untuk lebih jelas sebelum di bahas mengenai tanggapan responden terhadap variabel penelitian terlebih dahulu pada uraian berikut ini akan dapat kita lihat beberapa karakteristik dari responden.

1. Distribusi frekwensi umur responden.

Pada tabel berikut ini akan dapat kita lihat distribusi frekwensi umur responden sebanyak 65 orang responden dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Distribusi frekwensi umur responden

No	Umur responden	Frekwensi (Orang)	Pesentase (%)
1	21 – 26 Tahun	6	9.23
2	27 – 32 Tahun	10	15.38
3	33 – 38 Tahun	19	29.23
4	39 – 44 Tahun	15	23.08
5	45 – 50 Tahun	10	15.38
6	51 – 56 Tahun	5	7.69
J u m l a h		65	100,00

Sumber : Data Kuesioner, 2010

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa dari 65 orang responden, jumlah responden yang terbanyak adalah berumur antara 33-38 tahun, yaitu sebanyak 19 orang atau 29.23% responden. Sedangkan responden yang berumur antara 21-26 tahun berjumlah 6 orang atau 9.23% responden, responden dengan usia 27-32 tahun berjumlah 10 orang responden atau 15.38%. Kemudian responden dengan umur 39-44 tahun berjumlah 15 orang responden atau 23.05%, dan responden yang berusia 45-50 tahun berjumlah 10 orang responden atau 15.38%. Sedangkan responden dengan usia 51-56 tahun hanya berjumlah 5 orang responden atau 7.69%.

2. Distribusi jenis kelamin responden

Identifikasi selanjutnya adalah dengan membedakan jumlah responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, berikut jumlah responden dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Distribusi frekwensi jenis kelamin responden

No	Jenis Kelamin	Frekwensi (Orang)	Pesentase (%)
1	Laki-laki	48	73.85
2	Perempuan	17	26.15
Jumlah		65	100.00

Sumber : Data Kuesioner, 2010

Tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa responden jumlah responden terbanyak adalah laki-laki yaitu berjumlah 48 orang atau 73.85%, sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 17 orang responden atau 26.15%.

3. Distribusi Frekwensi Pendidikan responden

Selanjutnya untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan, dapat lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Distribusi frekwensi pendidikan responden

No	Pendidikan responden	Frekwensi (Orang)	Pesentase (%)
1	Tamat SD	0	0
2	Tamat SMP	3	4.62
3	Tamat SMA	18	27.69
4	Tamat D3/sederajat	26	40.00
5	Tamat S1	14	21.54
6	Tamat S2	4	6.15
Jumlah		65	100

Sumber : Data Kuesioner, 2010

Demikian pula dengan faktor pendidikan responden, karena dengan tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap persepsi, sikap, cara berfikir seseorang dalam memandang dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi disekitarnya. Tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4. 3 seperti diatas.

Tingkat pendidikan responden sebagaimana dijelaskan pada tabel tersebut, dapat dikemukakan bahwa tidak ada yang berpendidikan setingkat SD, kemudian responden yang berpendidikan tamat SMA sederajat sebanyak 18 orang responden atau sebesar 27.69%, responden dengan pendidikan Diploma III sederajat sebanyak 26 orang atau 40.00%. Untuk responden yang berpendidikan Sarjana sebanyak 14 orang responden atau 21.54%. Terdapat juga responden yang berpendidikan Pasca Sarjana yaitu berjumlah 4 orang atau sebesar 6.15%. Dapat disimpulkan responden yang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah kota Batam sudah mempunyai pendidikan yang baik.

C. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Bidang Pemasaran Produk Pada Pemerintah Kota Batam

Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dikaitkan dengan kondisi psikologis, sosial, ekonomi dan budaya daerah Batam. Pemerintah memandang perlu untuk memberdayakan UKM yang jumlahnya sangat banyak di daerah tersebut karena UKM dapat menjadi pilar ekonomi kerakyatan. Pemerintah juga berpendapat bahwa UKM relatif tahan terhadap guncangan moneter maupun berbagai kebijakan ekonomi makro, sehingga pemerintah harus terus memberdayakannya melalui usaha pembinaan secara terus menerus.

Program kerja menyangkut pemberdayaan UKM dalam semua bidang mulai dari ketersediaan bahan baku, permodalan, sumber daya manusia atau keterampilan (skill), mutu atau kualitas produk, sampai kepada pemasarannya. Hal tersebut dilandasi keyakinan bahwa pada era otonomisasi saat ini, konsep

pengembangan ekonomi rakyat harus diterjemahkan dalam bentuk program operasional berbasis ekonomi domestik pada tingkat kabupaten dan kota dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Untuk itu perlu ditegaskan bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan pada era otonomisasi saat ini tidak harus diterjemahkan dalam perspektif teritorial, tapi sebaiknya dikembangkan dalam perspektif 'regionalisasi' di mana di dalamnya terintegrasi kesatuan potensi, keunggulan, peluang, dan karakter sosial budaya.

Pembangunan harus dikembangkan dengan berbasis ekonomi domestik (bila perlu pada daerah kabupaten/kota) dengan tingkat kemandirian yang tinggi, kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif, adanya persaingan yang sehat, keterbukaan/demokratis, dan pemerataan yang berkeadilan. Semua ini merupakan ciri-ciri dari ekonomi rakyat sebagai tujuan bersama.

Untuk itu pemerintah kota Batam telah meluncurkan beberapa kegiatan guna memberdayakan para pelaku usaha kecil untuk meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan. Hasil penelitian menyebutkan program yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kualitas usaha kecil dan menengah

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam dalam rangka meningkatkan kualitas usaha kecil dan menengah antara lain disebutkan oleh Sekretaris Dinas dalam wawancara adalah dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan perencanaan bisnis, pelatihan kewirausahaan, pembinaan manajemen bagi usaha kecil dan menengah.

Hal ini setelah dikonfirmasi terhadap responden penelitian yang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah kota Batam, menyebutkan bahwa mereka memang telah mendapatkan berbagai pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kota Batam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Tanggapan responden terhadap adanya pelatihan perencanaan bisnis

No.	<i>Jawaban</i>	<i>Frekwensi (Orang)</i>	<i>Persentase (%)</i>
1	Sangat Setuju	14	21.54
2	Setuju	24	36.92
3	Ragu-ragu	16	24.62
4	Tidak Setuju	11	16.92
5	Sangat Tidak Setuju	0	0.00
	<i>Jumlah</i>	65	100

Sumber : Data Kuesioner, 2010

Dari tabel di atas sudah jelas bahwa program pelatihan perencanaan bisnis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam belum diikuti oleh sebagian besar UKM di kota Batam. Ini dibuktikan dari tanggapan responden yang menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan perencanaan bisnis. Hal ini bermakna bentuk pelatihan seperti ini UKM kota Batam harus melakukan pelatihan secara terus menerus sehingga informasi perencanaan bisnis dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua UKM yang ada di kota Batam.

Menurut teori yang dikemukakan oleh David R. Hamton bahwa perencanaan adalah pemikiran tentang keadaan dasar organisasi mengenai penentuan bagaimana seharusnya organisasi berposisi untuk menghadapi lingkungannya, dan bagaimana akan memanfaatkan kekuatan-kekuatannya serta bagaimana pula akan menghadapi tantangan dan kesempatan yang

ditumbulkan oleh lingkungannya. Sedangkan menurut George a Steiner Perencanaan strategi adalah suatu proses identifikasi kesempatan (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) disamping diupayakannya berbagai data untuk dasar keputusan yang lebih baik guna memanfaatkan kesempatan dan mengatasi tantangan yang ada.

Berdasarkan teori di atas bahwa pelatihan perencanaan bisnis harus ditingkatkan lagi sehingga seluruh UKM yang ada di kota Batam mendapat kesempatan yang sama terutama dalam hal pembinaan dan meminimalisasi kemungkinan kegagalan dan menekan resiko. Adapun manfaat pelatihan perencanaan bisnis adalah :

a. Peta jalan.

Maksudnya adalah sebagai panduan untuk memimpin berbagai perbedaan, baik manusi, budaya maupun pemikiran untuk menjadi satu arah dan bersinergi. Kapan kita harus mulai kerja dan kapan kita harus berhenti untuk melakukan maneuver yang telah kita tetapkan di awal tahun.

b. Monitoring pelaksanaan.

Dengan adanya perencanaan bisnis, kita bias memonitoring pekerjaan kita. Sejauh mana keberhasilan yang telah kita raih dan kegagalan yang harus dibenahi.

c. Alat bantu staf baru.

Agar staf baru mudah untuk beradaptasi maka diperlukan sebuah perencanaan bisnis. Biasanya perencanaan bisnis ini dirangkum dalam

sebuah buku dan staf baru bisa dengan mudah mempelajarinya tanpa perlu repot.

d. Perencanaan SDM

Sumber daya manusia adalah modal yang membutuhkan *fix cost* tinggi. Untuk mengetahui kapan dan berapa orang yang harus kita rekrut maka perencanaan bisnis harus dibuat. Karena dari situlah kita bisa membuat perkiraan karyawan seperti apa dan berapa yang kita butuhkan.

e. Alat koordinasi.

Sejak perencanaan bisnis bukan melulu rencana untuk bisnis tapi juga merangkum sejarah dan apa saja yang dialami perusahaan serta penanganannya, maka perencanaan bisnis juga bisa di jadikan sebagai alat koordinasi bagi semua karyawan dari divisi manapun dan sebagai sinkronisasi menuju keberhasilan bersama.

f. *Contingency Plan*

Alangkah baiknya jika kita juga menyediakan beberapa versi perencanaan bisnis. Karena kondisi yang kita hadapi juga tidak akan pasti, maka diperlukan banyak alternatif perencanaan bisnis. Meningkatkan daya nalar. Perencanaan bisnis diharapkan dapat meningkatkan daya nalar dari semua orang yang terlibat didalamnya. Sehingga semua orang yang ada dalam perusahaan bisa menjadi dewasa. Karena kedewasaan penting dimiliki setiap karyawan yang ada di perusahaan.

g. Alat evaluasi.

Perencanaan bisnis bisa dijadikan sebagai alat evaluasi. Karena di dalam perencanaan bisnis harusnya terdapat aturan – aturan yang harus

dipatuhi sehingga juga memudahkan bagi karyawan untuk mengetahui alasan dia dapat penalty ataupun reward.

h. Perencanaan *cash flow*.

Dalam *cash flow* juga kita dapat memberikan data mengenai *cash flow*, baik yang berupa uang maupun kegiatan yang berkaitan dengan uang itu sendiri.

Melihat manfaat yang disebutkan diatas maka perencanaan bisnis adalah sentral dari semua pekerjaan. Dimana dibutuhkan keterlibatan dari setiap orang termasuk professional, pengusaha, pihak pajak dan bank..

Sedangkan mengenai tanggapan responden terhadap kegiatan pelatihan kewirausahaan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Tanggapan responden terhadap adanya pelatihan kewirausahaan

No.	Jawaban	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	16	24.62
2	Setuju	24	36.92
3	Ragu-ragu	16	24.62
4	Tidak Setuju	8	12.31
5	Sangat Tidak Setuju	1	1.54
	<i>Jumlah</i>	<i>65</i>	<i>100</i>

Sumber : *Data Kuesioner, 2010*

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dikemukakan bahwa sebagian besar responden telah menerima pelatihan kewirausahaan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam. Namun demikian belum semua yang responden mendapatkan pelatihan kewirausahaan tersebut. Mengapa pelatihan kewirausahaan ini dianggap penting ?

Menurut Suryana (2003) Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda melalui :

1. Pengembangan teknologi baru
2. Penemuan pengetahuan ilmiah baru
3. Perbaikan produk barang dan jasa yang ada
4. Penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan sumber daya lebih efisien

Kewirausahaan (Suryana: 2003) adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui berfikir kreatif dan inovatif.

Meredith (2002), mengemukakan nilai hakiki penting dari wirausaha adalah:

- a. Percaya diri (*self confidence*)

Merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan, yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegairahan berkarya. Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Oleh karena itu wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri.

b. Berorientasi tugas dan hasil

Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil, adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan kerja keras. Dalam kewirausahaan peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman bertahun-tahun dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah dan semangat berprestasi.

c. Keberanian mengambil risiko

Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Wirausaha menghindari situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Pada situasi ini ada dua alternatif yang harus dipilih yaitu alternatif yang mengangung risiko dan alternatif yang konservatif . Pilihan terhadap risiko tergantung pada :

- Daya tarik setiap alternatif
- Kesiediaan untuk rugi
- Kemungkinan relatif untuk sukses atau gagal

Selanjutnya kemampuan untuk mengambil risiko tergantung dari :

- Keyakinan pada diri sendiri
- Kesiediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan untuk memperoleh keuntungan.
- Kemampuan untuk menilai situasi risiko secara realitis

d. Kempemimpinan

Seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai.

e. Berorientasi ke masa depan

Wirausaha harus memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, kuncinya adalah dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang ada sekarang.

f. Keorisinilan : Kreativitas dan Inovasi

Wirausaha yang inovatif adalah orang yang memiliki ciri-ciri :

- Tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik.
- Selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya
- Selalu ingin tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan

Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi yaitu : seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan. Keterampilan yang harus dimiliki oleh pengusaha UKM menurut Suryana (2003) :

- a. *Managerial skill*, Managerial skill atau keterampilan manajerial merupakan bekal yang harus dimiliki wirausaha. Secara garis besar ada dua cara untuk menumbuhkan kemampuan manajerial, yaitu melalui jalur formal dan informal. Jalur formal misalnya melalui jenjang lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan bisnis dan manajemen atau melalui pendidikan tinggi misalnya departemen administrasi niaga atau departemen manajemen yang tersebar berbagai perguruan tinggi baik

- negeri maupun swasta. Jalur informal, misalnya melalui seminar, pelatihan dan otodidak serta melalui pengalaman.
- b. *Conceptual skill*, Kemampuan untuk merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi usaha merupakan landasan utama menuju wirausaha sukses. Tidak mudah memang mendapatkan kemampuan ini. Kita harus ekstra keras belajar dari berbagai sumber dan terus belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain dalam berwirausaha.
 - c. *Human skill*, keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi dan berelasi, supel, mudah bergaul, simpati dan empati kepada orang lain adalah modal keterampilan yang sangat mendukung kita menuju keberhasilan usaha. Dengan keterampilan seperti ini, kita akan memiliki banyak peluang dalam merintis dan mengembangkan usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ini misalnya dengan melatih diri diberbagai organisasi, bergabung dengan klub-klub hobi dan melatih kepribadian kita agar bertingkah laku menyenangkan bagi orang lain.
 - d. *Decision making skill*, keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan. Sebagai seorang wirausaha, kita seringkali dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Berbagai permasalahan biasanya bermunculan pada situasi seperti ini. Wirausaha dituntut untuk mampu menganalisis situasi dan merumuskan berbagai masalah untuk dicarikan berbagai alternatif pemecahannya. Tidak mudah memang memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Agar tidak salah menentukan alternatif, sebelum mengambil keputusan, wirausaha harus mampu mengelola informasi sebagai bahan dasar pengambilan keputusan. Keterampilan memutuskan dapat kita pelajari dan kita bangun melalui berbagai cara. Selain pendidikan formal, pendidikan informal melalui pelatihan, simulasi dan berbagai pengalaman dapat kita peroleh.
 - e. *Time managerial skill*, keterampilan mengatur dan menggunakan waktu. Para pakar psikologi mengatakan bahwa salah satu penyebab atau sumber stress adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengatur waktu dan pekerjaan. Ketidakmampuan mengelola waktu membuat pekerjaan menjadi menumpuk atau tak kunjung selesai sehingga membuat jiwanya gundah dan tidak tenang. Seorang wirausaha harus terus belajar mengelola waktu. Keterampilan mengelola waktu dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan rencana-rencana yang telah digariskan.

Pemerintah kota Batam juga telah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dalam bentuk pembinaan manajemen usaha. Hal ini dengan tujuan memberikan kemampuan dalam berusaha. Untuk melihat tanggapan responden terhadap hasil wawancara tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Tanggapan responden terhadap adanya pembinaan manajemen usaha

No.	<i>Jawaban</i>	<i>Frekwensi (Orang)</i>	<i>Persentase (%)</i>
1	Sangat Setuju	16	24.62
2	Setuju	21	32.31
3	Ragu-ragu	15	23.08
4	Tidak Setuju	12	18.46
5	Sangat Tidak Setuju	1	1.54
	<i>Jumlah</i>	<i>65</i>	<i>100</i>

Sumber : Data Kuesioner, 2010

Berdasarkan tabel di atas pembinaan manajemen bisnis yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam belum optimal namun sudah berjalan walaupun sebagian telah mendapat pembinaan. Pembinaan manajemen bisnis dilakukan dalam bentuk, pelatihan manajemen usaha, supervisi lapangan serta pemberian pinjaman berupa modal kerja dan investasi. Pengamatan lapangan dimulai sejak responden mengikuti pelatihan di kelas, dan dilanjutkan dalam pembinaan lapangan di tempat usaha melalui program supervisi. 30 (tiga puluh) responden yang diamati merupakan pengusaha kecil (UKM dan Koperasi) yang mendapat pinjaman lunak dari PT. Jasa Marga (Pesero) pada periode 2002/2003. Jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun, jumlah pinjaman berkisar 10 juta sampai dengan 40 juta rupiah dengan suku bunga 6% per tahun dengan saldo menurun. Penilaian dilakukan sebanyak 5 (lima) kali melalui kunjungan supervisi dengan jangka waktu 7 (tujuh) bulan, dimana supervisi ini merupakan perlakuan yang diberikan terhadap responden, yang kemudian diamati dan dianalisis untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kinerja usaha responden. Penelitian ini didasarkan pada

pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Pusat Studi Koperasi dan UKM, LPPM INDONUSA Esa Unggul.

2. Menyediakan sarana pemasaran

Program pemberdayaan usaha kecil dan menengah bidang pemasaran, pemerintah kota Batam melalui dinas PMP-KUKM juga menyediakan sarana pemasaran dalam bentuk pameran yang diadakan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris dinas PMP-KUKM kota Batam dalam wawancara mengatakan:

”pemerintah telah menyediakan sarana pemasaran bagi pelaku usaha kecil dan menengah di kota Batam. Sarana tersebut seperti diadakannya pameran bagi pelaku usaha kecil dan menengah, bazar dengan tema *Batam Expo*. Kegiatan tersebut dilakukan agar produk usaha kecil dan menengah bisa dikenal lebih luas sehingga membantu meningkatkan omset penjualan. Kegiatan tersebut secara rutin dilakukan secara rutin tiap tahunnya”.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap hasil wawancara tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.7

Tanggapan responden terhadap adanya sarana pemasaran

No.	<i>Jawaban</i>	<i>Frekwensi (Orang)</i>	<i>Persentase (%)</i>
1	Sangat Setuju	30	46.15
2	Setuju	19	29.23
3	Ragu-ragu	10	15.38
4	Tidak Setuju	6	9.23
5	Sangat Tidak Setuju	0	0.00
	<i>Jumlah</i>	<i>65</i>	<i>100</i>

Sumber : Data Kuesioner, 2010

Tabel 4.7 dapat terlihat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam telah menyediakan sarana pemasaran dengan cukup baik, ini terlihat pada tanggapan responden yang sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh sekretaris Dinas

PMP-KUKM Kota Batam, bahwa mereka telah mengikut setiap pameran dan bazar yang diselenggarakan oleh pemerintah, hal tersebut berpengaruh terhadap usaha mereka terutama dalam meningkatkan penjualan produk. Kemudian sebanyak 19 orang responden atau 29.23% menyatakan setuju terhadap pernyataan wawancara diatas dan mereka juga terlibat sebagai peserta pameran, sebanyak 10 orang responden atau 15.38% menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan wawancara tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam pameran yang diadakan oleh dinas PMP-KUKM. Kemudian terdapat 6 orang responden atau 9.23% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan wawancara di atas karena mereka belum mendapat informasi tentang akan diadakannya kegiatan pameran dan bazar. Dari permasalahan di atas sudah jelas bahwa penyediaan sarana pemasaran sebaiknya lebih ditingkatkan agar dapat membantu pelaku UKM dengan mudah memasarkan produk mereka sehingga dapat dikenal dan bisa bersaing baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

Sarana pemasaran yang selama ini disediakan belum terlihat adanya suatu peningkatan pemasaran produk yang signifikan. Produk yang dihasilkan hanya setakat dikenal di dalam daerah saja. Salah satu upaya agar produk yang dihasilkan dapat dikenal baik di dalam dan di luar daerah sebaiknya Dinas PMP-KUKM Kota Batam mengupayakan sarana pemasaran yang lebih luas lagi melalui penggunaan internet sebagai media teknologi informasi dalam menunjang pemasaran produk UKM.

Internet digunakan sebagai media komunikasi dengan berbagai pihak. Misalnya disini antara UKM dengan supplier. Sebagai contoh UKM di bidang

peternakan ayam. Pemiliknya bisa menggunakan e-mail kepada supplier pakan ternaknya misalnya untuk melakukan order atau sebaliknya pihak supplier yang melakukan komunikasi dengan UKM. Komunikasi disini bisa bermacam-macam, salah satu yang sudah dibahas tadi misalnya penggunaan e-mail.

Ini maksudnya internet digunakan sebagai sarana promosi jasa atau produk yang ditawarkan oleh UKM. Sebagai contoh misalnya UKM di bidang persewaan kendaraan bisa mempromosikan jasanya melalui *website* atau juga melalui *mailing list*. Dari pengalaman penulis bahwa media *mailing list* merupakan yang paling efektif untuk menawarkan jasa atau produk. Itu dikarenakan bahwa *mailing list* adalah suatu forum diskusi berbasis *e-mail* mengenai suatu topik tertentu. Orang-orang atau pihak-pihak yang tergabung dalam suatu mailing list tertentu biasanya mempunyai satu kesamaan tujuan dan juga kesamaan minat tertentu. Dengan demikian promosi bisa lebih fokus kepada target *audience* tertentu dan relevan dengan produk yang Anda tawarkan.

Fungsi lain dari internet yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melakukan riset dan perbandingan. UKM harus memanfaatkan internet untuk riset agar bisa mengetahui seberapa jauh keunggulan produknya dibanding produk sejenis lain yang sudah ada. Fungsi riset disini juga bisa digunakan untuk mencari formula baru untuk memperkuat mutu dari produk atau jasa. Riset juga berguna untuk mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh kompetitor dengan produk yang sejenis dengan yang Anda punya. Senjata utama dari melakukan riset adalah dengan cara memanfaatkan search engine

dengan baik. Menggunakan search engine tidaklah sesederhana yang Anda bayangkan. Penggunaan keyword yang tepat akan mempercepat usaha riset Anda di internet dan pada akhirnya juga akan bisa bersaing dengan UKM lain yang belum memanfaatkan internet untuk melakukan riset.

3. Memberikan dukungan jaringan pemasaran.

Pemerintah kota Batam juga memberikan dukungan jaringan pemasaran bagi usaha kecil dan menengah dalam rangka pemberdayaan dibidang pemasaran ini. Bentuk jaringan pemasaran tersebut dengan mengadakan temu usaha dengan para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada didaerah lain. Kegiatan temu usaha tersebut juga sebagai fasilitas kemitraan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Sekretaris Dinas PMP-KUKM kota Batam mengatakan bahwa:

”kegiatan yang dilakukan dalam rangka membentuk jaringan usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan mengadakan temu usaha dan misi dagang dengan dengan para pelaku usaha kecil dan menengah didaerah lain. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada bulan Maret 2010 dengan mendatangkan para pengusaha dari Provinsi Jawa Tengah yang juga memasarkan produk-produk unggulan mereka. Kegiatan tersebut bertujuan agar usaha kecil dan menengah kota Batam bisa memperoleh tentang peluang pasar di Jawa Tengah untuk penjualan produk mereka.”

Kegiatan Peningkatan Akses Pasar dan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi 10 UKM/IKM Jawa Tengah untuk mengikuti penyelenggaraan Misi Dagang dan Temu Usaha Produk Unggulan UKM/IKM Jawa Tengah dengan Pelaku Usaha di Batam dan Melaksanakan Pameran di salah satu Mall di Kota Batam. Pemilihan mall yang strategis, ramai banyak dikunjungi masyarakat menjadi pilihan yang tepat untuk menyelenggaraan pameran bagi produk unggulan UKM/IKM Jawa Tengah. Melalui

penyelenggaraan pameran, diharapkan produk-produk unggulan UKM/IKM Jawa Tengah dapat dikenal lebih luas dan diakses lebih cepat oleh konsumennya baik secara ritel maupun order.

Tanggapan responden terhadap hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8

Tanggapan responden terhadap dukungan jaringan pemasaran.

No.	Jawaban	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	26	40.00
2	Setuju	24	36.92
3	Ragu-ragu	8	12.31
4	Tidak Setujug	7	10.77
5	Sangat Tidak Setuju	0	0.00
Jumlah		65	100

Sumber : Data Kuesioner, 2010

Temu usaha atau misi dagang pada dasarnya juga merupakan media yang bertujuan untuk mempromosikan produk kepada pasar. Biasanya dalam misi dagang dilaksanakan dalam ruang lingkup yang sangat luas, menyangkut semua aspek perdagangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung kelancaran perdagangan. Temu usaha juga merupakan kegiatan yang cukup luas, memerlukan biaya yang besar dan menuntut pengetahuan luas dari produsen dan pembeli tentang barang dan manajemen pemasarannya.

Penyelenggaraan Temu Usaha antara UKM/IKM Jawa Tengah dengan Pelaku Usaha Batam menjadi momentum yang sangat penting. Maksud dan tujuan Misi dagang ini antara lain sebagai berikut :

- a. Mempromosikan produk UKM di Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan akses pasar dan menarik masyarakat konsumen luar Jawa Tengah untuk mengenal dan memakai produk UKM/IKM Jawa Tengah

- c. Menginformasikan kepada masyarakat konsumen tentang perkembangan dan potensi yang dimiliki produk-produk UKM/IKM Jawa Tengah.
- d. Menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap produk-produk produksi dalam Negeri & Meningkatkan motivasi masyarakat untuk berperan serta dalam industri kreatif dan meningkatkan penghargaan dan kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri.
- e. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kekuatan, keanekaragaman produk-produk UKM/IKM yang memiliki daya saing tinggi, tidak kalah dengan produk mancanegara yang sejenis.
- f. Mendorong pemasaran langsung produk UKM/IKM Jawa Tengah, dalam rangka peningkatan akses pasar yang lebih luas
- g. Menciptakan ruang interaksi sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat dan UKM/IKM Jawa Tengah dengan daerah Kabupaten Kota di Indonesia
- h. Sebagai wujud pelaksanaan pembinaan terhadap usaha perdagangan UKM/IKM di Jawa Tengah menuju peningkatan ekonomi daerah dan nasional.

D. Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Pemerintah Kota Batam

Sebuah kebijakan publik dalam pelaksanaannya tidak bisa berjalan begitu saja, perlu adanya pengawasan yang salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai proses evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana keefektifan sebuah kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan, karena evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara

harapan dan kenyataan. Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Begitu juga dengan program pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, pemberdayaan yang dilakukan karena memiliki potensi yang besar dan strategis dalam rangka mengurangi kemiskinan, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh usaha kecil dan menengah jelas mampu memberikan nilai tambah terhadap masyarakat, yaitu akan tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usaha kecil dan menengah mampu menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

Era persaingan global yang semakin ketat dan terbuka, merupakan fenomena yang harus dihadapi oleh pelaku usaha adalah menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang kuat dan harga produk yang kompetitif. Keberadaan UKM sebagai salah satu kekuatan pendukung pergerakan perdagangan dalam negeri dan pendorong pembangunan ekonomi, memiliki peran yang sangat penting dan sangat menentukan dalam rangka pemulihan ekonomi regional dan nasional. Menghadapi dampak krisis global yang melanda hampir seluruh Negara di dunia, dan dengan diberlakukannya Asean-China Free Trade Area maka perdagangan dalam negeri diharapkan mampu menjadi penyelamat dari dampak krisis tersebut dan memiliki daya saing dengan produk/barang-barang dari China.

Berbagai jenis dan tingkat usaha perdagangan dalam masyarakat yang senantiasa terus berkembang memerlukan langkah – langkah yang nyata

sebagai bentuk usaha pembinaan dan pengembangan untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif didalam negeri. Pada saat ini, kondisi usaha perdagangan dihadapkan pada berbagai hambatan yang sangat kompleks, hal ini menjadi suatu tantangan yang membutuhkan keseriusan dan semangat besar untuk memenangkan persaingan pasar yang sehat.

Pembangunan usaha perdagangan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, meliputi sistem komunikasi, transportasi, promosi dan informasi pasar serta instrumen pendukung lain yang sangat penting pula peranannya, yaitu kebijakan pemerintah dibidang usaha perdagangan dan ekonomi.

Tanggapan responden dalam menilai apakah implementasi kebijakan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada Pemerintah Kota Batam telah berjalan dengan baik maka dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Sebelum sebuah kebijakan di implementasikan haruslah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada para pelaksana kebijakan dan pihak sasaran yang akan menjadi target dari kebijakan tersebut. Dalam indikator komunikasi ini penulis menurunkan dua sub indikator yaitu kejelasan informasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan, berdasarkan temuan dalam penelitian berdasarkan kedua sub indikator tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kejelasan Informasi

Maksud dari sub indikator kejelasan informasi ini adalah apakah informasi mengenai program pemberdayaan usaha kecil dan menengah di kota Batam telah disalurkan dengan baik kepada pelaku UKM yang ada di Batam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam pada tanggal 03 Mei 2010 Pukul 10:00 wib mengatakan bahwa :

“Penyampaian informasi mengenai program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dapat disalurkan dengan baik melalui media masa dan musrenbang kecamatan dan kelurahan setiap tahunnya. disamping itu informasi juga disampaikan secara langsung melalui surat edaran kepada pelaku UKM dan kelompok-kelompok usaha yang ada di kota Batam, kegiatan-kegiatan tentang pemasaran produk UKM juga telah disosialisasikan kepada pelaku UKM, sehingga informasi tentang kegiatan pemberdayaan ini dapat diterima oleh para pelaku UKM.”

Berikut jawaban responden terhadap sub indikator kejelasan informasi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 9

Tanggapan Responden terhadap Sub Indikator Kejelasan Informasi

No.	Jawaban	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	21	32,31
2	Setuju	43	66,15
3	Tidak Setuju	1	1,54
Jumlah		65	100

Sumber : Data Kuesioner, 2010

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dijelaskan bahwa kejelasan informasi program kegiatan yang disampaikan Dinas PMP-KUKM Kota Batam cukup jelas dan akurat. Penyebaran informasi yang telah dilakukan melalui media masa, musrenbang kecamatan dan kelurahan serta surat edaran memungkinkan

pelaku UKM cepat tanggap tentang keberadaan program –program pemberdayaan pada Dinas PMP-KUKM Kota Batam .

Kejelasan informasi ini pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang sehingga dapat memungkinkan setiap UKM dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaannya secara lebih pasti. Sesuai fungsinya bahwa informasi dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi (information-processing system). Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Sesuai teori yang dikatakan Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Oleh sebab itu Dinas PMP-KUKM dalam menyampaikan informasi program tidak ada kendala yang berarti.

b. Pemahaman terhadap kebijakan

Suatu kebijakan tidak hanya cukup didukung dan dikomunikasikan tetapi harus mampu dipahami oleh pelaksana kebijakan terhadap program yang akan dijalankan. Apabila setiap program yang akan dijalankan terlebih dahulu sudah dipahami oleh para pelaksana maka akan dengan mudah dilaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya pemahaman yang baik maka tidak mungkin para impementor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk

pada Pemerintah Kota Batam, seluruh pelaksana kebijakan harus memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut, selain itu juga target kebijakan ini yaitu para pelaku UKM yang ada di Batam juga harus mengetahui bagaimana program yang akan mereka ikuti. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam pada tanggal 03 Mei 2010 Pukul 10:00 wib, mengatakan bahwa :

”belum seluruh pegawai memahami arti pentingnya pemberdayaan usaha kecil dan menengah pada Pemerintah Kota Batam ini, sehingga belum terjadi sinergi yang optimal antar seksi atau antar bagian akibat masih lemahnya koordinasi. Untuk itu kami terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawai dengan melakukan penjelasan-penjelasan terhadap setiap program yang akan dijalankan agar memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing. Sehingga mampu menjalankan program dengan baik serta mampu memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada para pelaku UKM yang akan diberdayakan.”

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap sub indikator pemahaman terhadap kebijakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10

Tanggapan responden terhadap pemahaman kebijakan

No.	Jawaban	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	10	15.38
2	Setuju	23	35.38
3	Ragu-ragu	22	33.85
4	Tidak Setuju	8	12.31
5	Sangat Tidak Setuju	2	3.08
Jumlah		65	100

Sumber : Data Kuesioner, 2010

Pemahaman terhadap program-program kegiatan kelihatannya dari analisa tabel menunjukkan gejala yang kurang baik. Dimana responden sebagian saja yang memahami akan makna program yang ada. Dampak seperti ini akan menjadi kendala pelaksanaan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Jalur

yang tepat dalam memberikan pemahaman suatu program kepada UKM adalah melalui langkah koordinasi.

Sesuai dengan teori koordinasi yang disampaikan oleh :

1. E. F. L Brech dalam bukunya *The Principle and Practice Of Management*, mengatakan bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan mengerakkan Tim dengan memberikan lokasi kegiatan yang cocok kepada masing – masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.
2. G. R Terry dalam bukunya *Practice Of Management*, Koordinasi adalah suatu usaha sinkron / teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pada pelaksanaa untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang ditentukan.

Ada beberapa perbedaan dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program sehingga koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program berjalan sebagaimana mestinya. Perbedaan itu adalah :

1. Koordinasi yang dilakukan secara vertikal, tindakan – tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
2. Koordinasi Horisontal, tindakan – tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.

Selanjutnya cara-cara yang ditempuh dalam melakukan koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Memberikan keterangan langsung dan bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup jelas.karena tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan, menghasilkan koordinasi yang diharapkan.
2. Mensosialisasikan kepada masing – masing anggota, agar tujuan tersebut dapat berjalan secara bersama dan tidak sendiri – sendiri.
3. Mendorong anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, dll.
4. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkatan perumusan dan penciptaan sasaran.

Untuk meningkatkan pemahaman program yang telah di buat oleh Dinas PMP-KUKM Kota Batam mestinya dapat dipahami terlebih dahulu maksud dan tujuannya dan dilakukan melalui koordinasi yang secara terus menerus, sehingga pelaku UKM dapat menjalankan program apa yang mereka ikuti dengan pencapaian tujuan dan arah yang jelas demi peningkatan kualitas dan kuantitas suatu produk yang dihasilkan demi kesejahteraan yang diharapkan.

c. Koordinasi Antar Pelaksana Kebijakan

Implementasi sebuah kebijakan dalam bentuk program-program melibatkan berbagai petugas, bagian, instansi sebagai pelaksana kebijakan dalam menjalankan kegiatan. Para pelaksana kebijakan tersebut harus selalu bekerjasama dan mampu menyelaraskan persepsi, tindakan, dan keputusan yang sejalan dalam bentuk saling berkoordinasi dalam menjalankan kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada Pemerintah Kota Batam yang melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program tersebut. Pihak yang terlibat harus saling berkoordinasi dalam menjalankan program, dan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam pada tanggal 03 Mei 2010 Pukul 10:00 wib mengatakan bahwa :

“dalam menjalankan kebijakan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada Pemerintah Kota Batam telah melibatkan antar instansi yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Batam dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam, koordinasi dilakukan karena data-data lengkap mengenai jumlah, jenis dan tempat usaha seluruh usaha kecil dan menengah yang ada di Batam berada pada dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Batam, oleh karena itu berdasarkan data tersebut maka Dinas PMP-KUKM Batam menentukan target dari kebijakan pemberdayaan ini, kemudian dalam menjalankan program ini melibatkan antar bagian dan seksi di lingkungan intern dinas PMP-KUKM sendiri sebagai team dari kegiatan ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi telah berjalan baik dengan pihak-pihak terkait”.

Tanggapan responden dari pelaku usaha kecil dan menengah kota Batam terhadap sub indikator koordinasi ini dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.11

Tanggapan Responden terhadap sub indikator koordinasi

No.	Jawaban	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	10	15.38
2	Setuju	21	32.31
3	Ragu-ragu	20	30.77
4	Tidak Setuju	11	16.92
5	Sangat Tidak Setuju	3	4.62
	Jumlah	65	100

Sumber : Data Kuesioner, 2010

Berdasarkan analisa tabel bahwa koordinasi yang selama ini dilakukan ternyata kurang berjalan sebagaimana mestinya baik antara Dinas PMP-KUKM, instansi terkait ataupun pelaku UKM itu sendiri. Ini terbukti bahwa sebagian besar UKM yang berada di kota Batam menyatakan tidak setuju, sehingga menyulitkan pelaku UKM menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya. Seharusnya pihak pembuat program harus secara kontiniu melakukan koordinasi timbal balik dalam melaksanakan program dalam pencapaian tujuan. Mengapa koordinasi itu diperlukan ?

Menurut teori yang disampaikan oleh George R Terry bahwa koordinasi merupakan penyesuaian yang teratur usaha-usaha untuk menyiapkan jumlah yang cocok menurut mestinya, waktu dan pengarahannya sehingga menghasilkan tindakan-tindakan harmonis dan terpadu menuju sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut pengertian yang lain bahwa koordinasi pada hakekatnya merupakan upaya memadukan (mengintegrasikan), menyetarakan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak langkah dan waktu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang sama (LAN,1997)

Agar pelaksanaan koordinasi dapat berjalan dengan baik maka sebaiknya pihak Dinas PMP-KUKM, instansi terkait ataupun pelaku UKM, harus saling menjalin hubungan kerja yang baik karena melalui hubungan kerja akan tercapai tujuan yang dimaksud dalam program secara bersama. Untuk itu perlu teknik hubungan kerjasama digunakan sebagai usaha pencapaian program yang hendak dicapai. Adapun teknik tersebut adalah :

1. *Appreciation* (menghargai pendapat orang lain)
2. *Influence* (melakukan interaksi)
3. *Control* (mengendalikan) pendekatan rapat koordinasi
(Kurt Lewin % DR. Wiliam E. Smith)
4. Menghitung semua faktor pendukung
5. Menentukan strategi
6. Mengikutsertakan semua pihak terkait (stake Holder)
 - Individu / kelompok / institusi di dalam organisasi
 - Individu / kelompok / institusi di luar organisasi
7. Penyusunan saran dan rencana secara kongkrit

2. Sumber Daya

Merupakan sumber daya yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada Pemerintah Kota Batam sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sumber daya merupakan alat yang penting di dalam melaksanakan suatu kebijakan. Adapun sub indikator dari indikator ini yaitu:

a. Staf

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi didalam implementasi kebijakan ialah faktor staf. Keberhasilan proses sebuah program sangat tergantung dari sumberdaya yang tersedia, staf merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses pelaksanaan program menuntut adanya sumberdaya

manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Akan tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Staf yang dimaksud didalam hal ini adalah ketersediaan tenaga pelaksana kebijakan untuk menjalankan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada Pemerintah Kota Batam, karena tanpa adanya staf maka akan mustahil sebuah kebijakan dapat dijalankan. dan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam pada tanggal 03 Mei 2010 Pukul 10:00 wib mengatakan bahwa :

”petugas (staf) untuk menjalankan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada Pemerintah Kota Batam memang sudah tersedia, namun dari segi kuantitas belum cukup memadai bahkan kurang, sehingga dalam melaksanakan kegiatan ini staf harus saling mendukung dan membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Para petugas juga sudah dibekali wewenang dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan team pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada Pemerintah Kota Batam, dengan adanya wewenang tersebut para petugas akan mengerti tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan ini.”

b. Sumber Daya Finansial

Keberadaan SDM yang cukup dan berkompeten dibidangnya tidaklah cukup bagi sebuah pelaksanaan program tanpa didukung oleh finansial yang memadai. Salah satu sumber daya pendukung keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya finansial (keuangan), karena tanpa adanya dana sangat mustahil suatu kegiatan dapat berjalan. Begitu halnya juga dalam pelaksanaan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada Pemerintah Kota Batam. Hasil wawancara dengan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam pada tanggal 03 Mei 2010 Pukul 10:00 wib, mengatakan bahwa :

”sumber dana kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada Pemerintah Kota Batam berasal dari dana APBD kota Batam yang telah sebelumnya diusulkan ke DPRD kota Batam. Karena kegiatan ini sifatnya terus menerus dilakukan maka sudah menjadi dana dan kegiatan rutin bagi Dinas PMP-KUKM kota Batam. Dan waktu kegiatan juga dilakukan secara berkelanjutan dan tidak ditentukan target waktu kegiatan ini”.

Kenyataan empirik diatas, sejalan dengan konsep teori yang dikemukakan Grindle (dalam Sunggono, 1984:148) bahwa proses pelaksanaan kebijakan, selain memuat program yang rinci, juga dialokasikan sejumlah dana untuk mencapai tujuan itu. Konsep teoritis tersebut juga dikemukakan Edward III (1980:10-12) bahwa salah satu faktor pendukung dalam sebuah kebijakan bukan hanya sumber daya manusia namun juga sumber daya dalam bentuk dana.

Mengikuti pemikiran ahli tersebut, dapat dikemukakan bahwa program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada Pemerintah Kota Batam, selain harus memiliki program-program yang rinci, juga harus didukung dengan dana operasional yang memadai. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada Pemerintah Kota Batam akan lebih efektif, apabila tersedianya anggaran bagi kegiatan program tersebut, terutama untuk memotivasi para pelaksana program. Hal ini sejalan dengan pendapat Wasistiono (2003:98) bahwa program kegiatan harus diikuti dengan dukungan anggaran dana yang memadai.

c. Sarana dan prasarana pendukung

Pelaksanaan program pemberdayaan UKM yang telah dirumuskan melalui kegiatan-kegiatan sangat memerlukan sarana dan prasarana pendukung demi kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Keberadaan pelaksana kegiatan yang cukup dan ahli dibidangnya yang didukung oleh tersedianya sumber daya keuangan yang cukup belum tidak menjadi jaminan bahwa setiap kegiatan akan berjalan dengan baik seperti yang dirumuskan tanpa adanya dukungan dari sarana dan prasarana. Maksud dari sub indikator sarana dan prasarana kegiatan ini adalah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang bisa digunakan untuk pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada Pemerintah Kota Batam.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendukung kegiatan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran, sudah tersedia dengan baik, hal ini sesuai dengan jawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam pada tanggal 03 Mei 2010 Pukul 10:00 wib, mengatakan bahwa :

”peralatan dan perlengkapan kantor sudah tersedia dengan baik guna mendukung pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran, karena kegiatan ini sifatnya berkelanjutan tiap tahunnya maka sarana dan prasarana pendukung seperti ini sudah kita anggarkan dalam anggaran kegiatan rutin.

Oleh karen itu dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Batam sudah didukung oleh keberadaan para staf yang melaksanakan kebijakan, sumber daya finansial juga telah tersedia melalui dana APBD yang telah dianggarkan tiap tahun, waktu, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan juga telah tersedia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari indikator sumber daya kebijakan sudah tersedia dengan baik untuk melaksanakan implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada pemerintah kota Batam, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah sudah berjalan dengan baik dengan didukung personil, sumber daya keuangan sarana dan prasarana guna pelaksanaan kegiatan juga telah tersedia. Program Pemberdayaan UKM di kota Batam juga berdampak positif bagi pelaku UKM, hal ini terlihat dengan adanya peningkatan produksi sebagai dampak banyaknya permintaan terhadap produk UKM. Jaringan pemasaran produk juga semakin luas dengan adanya beberapa pelaku UKM yang telah membukan outlet diluar daerah, bahkan produk UKM juga telah merambah pasar luar negeri dengan mengekspor produknya.

Program pemberdayaan usaha kecil dan menengah telah melakukan berbagai kegiatan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas usaha kecil dan menengah, dengan mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan perencanaan bisnis, pelatihan kewirausahaan, pembinaan manajemen bagi usaha kecil dan menengah. Dampak adanya pelatihan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan UKM dengan meningkatnya produksi setiap tahun, memiliki daya saing tinggi, sehingga beberapa produk UKM telah melakukan penjualan diluar negeri.

2. Menyediakan sarana pemasaran, dengan menyediakan sarana pemasaran dalam bentuk pameran, bazar yang diadakan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini sangat efektif karena dapat membantu bagi UKM yang baru untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luas.
3. Memberikan dukungan jaringan pemasaran, dengan cara mengadakan temu usaha dengan para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di daerah lain. Program ini sangat efektif guna mendorong pemasaran langsung produk UKM dalam rangka peningkatan akses pasar yang lebih luas dengan membuka *outlet-outlet* di daerah lain.

Dalam pelaksanaan Program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam bidang pemasaran produk pada pemerintah kota Batam tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu:

1. Pada Faktor komunikasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Bidang Pemasaran Produk Pada Pemerintah Kota Batam telah secara efektif dikomunikasikan dan diinformasikan dengan baik kepada para pelaku UKM yang ada di kota Batam sebagai sasaran program ini. Informasi yang diterima pelaku UKM kota Batam juga sudah jelas tentang adanya program pemberdayaan UKM, dalam hal koordinasi antar instansi dan bagian para pelaksana kebijakan juga sudah berjalan dengan baik sesuai dengan hasil penelitian.
2. Pada faktor sumber daya, dapat dikemukakan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam

Bidang Pemasaran Produk Pada Pemerintah Kota Batam telah didukung dengan sumber daya dengan baik, hal ini terlihat dengan tersedianya sumber daya financial dan sarana prasarana pendukung dalam menjalankan program pemberdayaan UKM ini. Untuk sumber daya staf, walaupun sudah tersedia staf namun masih kurang dalam hal kuantitas sehingga untuk kedepannya dalam menjalankan program harus lebih ditingkatkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut penulis merekomendasikan saran pada faktor sumber daya, penting diperhatikan adalah dengan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dalam menjalankan program pemberdayaan UKM selanjutnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan program ini juga perlu ditingkatkan sehingga memiliki kompetensi yang baik. Sehubungan itu juga diperlukan dukungan financial yang lebih memadai baik diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Basri, B.(1999). *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan: Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : Bina Rena Pariwara.
- Buchari Alma. (2003). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik* . Surabaya : Erlangga.
- Dunn, William.(2000). *Public Policy Analysis, University Of Pittsburgh*, Penerjemah Samodra, Diah Asitadani, Agus H. Erwan Agus. Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- , 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara berkembang*. Jakarta : Elek Media Komputindo
- , 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Elek Media
- , 2003. *Kybernology 1 dan 2 Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2000. *Public policy*. Jakarta : Elek Media
- Edwards, George. (1980). *Implementating Public Policy*, Washington DC: Congress Conal Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. (1991). *Public Choice and Policy Change: The Political Economy Of Reform In Developing Countries*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Islamy, Irfan. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Carles. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Diterjemahkan oleh Ricky Istamto. Rajawali Pers : Jakarta.
- Kasim, A. (1999). *Teori Pembuatan Keputusan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Keban, Y.T. (2004). *Enam dimensi strategi administrasi publik, konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.

- Kismartini, dkk. (2002). *Membangun Koperasi berbasis anggota dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat*. Bogor : Pusat Studi Pengembangan.
- Longenecker, Justin G., et al. 2000. *Kewirausahaan: Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta : Salemba Empat.
- Meredith, Geoffrey G. (2002). *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*. Jakarta : PPM
- Nazir, Muhammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. (1997). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Onny, P. & Pranarka. (1996). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Centre For Strategic And International Studies. Jakarta : Gaya Media
- Puranto, E. A dan Sulistyastuti, D. R. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Rasyid, M.R. (2000). *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta : Yasrif Watampone.
- Said Zainal, A. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Soeharto, P. (2001), *Ekonomi Rakyat, Kosep, Kebijakan, dan Strategi*. Yogyakarta: BPFE
- Suharsimi, A.(1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suryana. (2003). *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empa
- Sutisna. (2003). *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta : Grasindo.
- Thoha, M. (1995). *Prilaku Organisasi-Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tilaar, (1997). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia

- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wekley, N.K. & Yuki, G. (2003). *Prilaku Organisasi dan Psikologi Personal*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wibawa, Samodra, dkk., (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wursanto, Ig. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Press.

Dokumen

Undang-undang nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan pengembangan usaha kecil

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA PEMERINTAH KOTA BATAM

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah Informasi mengenai program pemberdayaan usaha kecil dan menengah telah disalurkan dengan baik kepada para pelaku UKM yang ada di kota Batam?
2. Apakah Informasi mengenai program pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang telah disampaikan kepada pelaku UKM yang ada di kota Batam sudah jelas tujuan dan sarannya?
3. Apakah peluang-peluang pemasaran telah diinformasikan kepada pelaku UKM dikota Batam?
4. Apakah koordinasi antar bagian/bidang/seksi yang menangani program pemberdayaan usaha kecil dan menengah sudah berjalan dengan baik?
5. Bagaimana dengan keadaan staff/petugas? Apakah dari segi kualitas maupun kuantitas petugas yang melaksanakan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah di kota Batam sudah tersedia?
6. Apakah para staf/petugas yang menjalankan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dikota Batam ini sudah mengetahui apa tugas mereka dalam menjalankan program?
7. Apakah para staf/petugas sudah mempunyai wewenang dalam menjalankan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dikota Batam?
8. Apakah sarana dan prasarana pendukung untuk menjalankan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dikota Batam sudah mendukung?
9. Dana untuk menjalankan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dikota Batam berasal dari mana? Apakah sudah tersedia?
10. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah?

11. Apakah orang-orang yang ditunjuk untuk menjalankan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah dikota Batam memiliki kompetensi dibidangnya?
12. Apakah para petugas tersebut diberikan insentif guna menunjang tugas mereka?
13. Apakah sudah ada pembagian tugas dan tanggungjawab pada setiap unit kerja ?
14. Apakah pernah diadakan pelatihan perencanaan bisnis bagi pelaku UKM yang ada di Batam?...
Jika ada, Apa tujuannya?
15. Apakah Pemko Batam melakukan pembinaan terhadap pelaku UKM agar mampu membentuk usaha yang berkualitas?
Jika ada, Apa tujuannya?
Dan apa saja kegiatannya?
16. Apakah Pemko Batam telah melakukan pelatihan kewirausahaan terhadap bagi pelaku UKM?
Jika ada, Apa tujuannya?
17. Apakah Pemko Batam telah pernah mengadakan pelatihan studi kelayakan produk sebelum dipasarkan oleh UKM?
Jika ada, Apa tujuannya?
18. Apakah Pemko Batam pernah melakukan pembinaan manajemen bagi UKM? Jika ada, Apa tujuannya?
19. Apakah Pemko Batam pernah mengadakan kegiatan Pameran bagi UKM?
20. Apakah Pemko Batam telah menyediakan fasilitas marketing point UKM?
21. Apakah Pemko Batam pernah mengadakan kegiatan temu usaha antar pelaku UKM?
22. Apakah ada fasilitas kemitraan bagi UKM?

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA PEMERINTAH KOTA BATAM

DAFTAR PERTANYAAN / KUESIONER



I. Petunjuk Pengisian Angket

1. Kepada para responden diminta untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini dengan cara memberi tanda silang (x) salah satu jawaban dengan ketentuan jawaban :
 1. Sangat Tidak Setuju
 2. Tidak Setuju
 3. Ragu-ragu
 4. Setuju
 5. Sangat Setuju
2. Tujuan dari pengisian kuesioner ini adalah untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Pada Pemerintah Kota Batam. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, dan Dukungan lingkungan.
3. Penelitian ini tidak ada hubungannya dengan kebenaran atau kesalahan dari suatu kebijakan atau mencari kesalahan/keburukan seseorang ataupun instansi terkait, melainkan dengan maksud ilmiah dalam rangka penulisan Tesis mahasiswa program pasca sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Jakarta tahun 2010.
4. Jawaban yang akan Anda Berikan akan dijamin kerahasiaannya, begitu juga dengan identitas Anda.

II. Latar Belakang Responden

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir : *(Lingkari pilihan)*
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA
 - d. Diploma
 - e. Sarjana S1
 - f. Sarjana S2, dan seterusnya
6. Nama Perusahaan :
7. Mulai Beroperasi :
8. Jumlah Karyawan :

III. Variabel Implementasi Kebijakan

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	R	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Program pemberdayaan usaha kecil dan menengah telah diinformasikan kepada pelaku UKM dikota Batam					
2.	Informasi yang telah disampaikan mengenai program pemberdayaan usaha kecil dan menengah sudah jelas tujuan dan sasarannya.					
3.	Pemerintah Kota Batam mengkomunikasikan kepada perusahaan saya tentang peluang-peluang untuk memasarkan hasil.					
4.	Petunjuk mengenai program pemberdayaan UKM yang telah diberikan kepada pelaku UKM telah jelas dan konsisten.					
5.	Koordinasi antar instansi/bagian/bidang/seksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Batam sudah berjalan dengan baik.					
6.	Para pelaksana kebijakan/sudah bersikap baik dalam menjalankan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah di kota Batam					
7.	Pemerintah Kota Batam melakukan pelatihan perencanaan bisnis bagi pengusaha di Batam					
8.	Pemerintah Kota Batam telah melakukan pembinaan terhadap pelaku UKM agar mampu membentuk usaha yang berkualitas					
9.	Pemerintah Kota Batam telah melakukan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UKM					
10.	Pemerintah Kota Batam mengadakan pelatihan studi kelayakan produk untuk pemasaran bagi UKM					
11.	Pemerintah Kota Batam telah melakukan pembinaan manajemen UKM					
12.	Pemerintah Kota Batam telah mengadakan Pameran khusus UKM, kami pelaku UKM juga diberi peluang untuk mengikuti pameran tersebut.					
13.	Pemerintah Kota Batam telah mengadakan kegiatan temu usaha bagi pelaku UKM kota					

	Batam dengan pelaku UKM daerah lain.					
14.	Pemerintah Kota Batam telah menyediakan fasilitas kemitraan bagi UKM di Kota Batam.					

UNIVERSITAS TERBUKA

TABULASI DA'

Responden	KOMUNIKASI				KOORDINASI
	1	2	3	4	
	1	4	3	4	
2	4	5	3	5	4
3	4	4	4	4	4
4	4	4	2	3	1
5	5	4	3	4	2
6	4	5	4	2	3
7	3	4	3	3	5
8	5	2	2	5	3
9	2	5	5	4	3
10	3	3	4	2	4
11	4	4	3	3	2
12	5	5	2	5	5
13	3	3	5	1	4
14	2	4	3	5	4
15	3	5	4	3	2
16	5	2	2	2	3
17	5	5	5	5	3
18	3	3	3	4	4
19	4	4	3	3	3
20	5	4	3	5	4
21	3	5	5	4	2
22	1	3	4	2	3
23	5	4	3	3	3
24	1	5	2	5	4
25	3	4	4	4	4
26	2	3	1	4	4
27	4	4	2	5	4
28	3	2	3	2	2
29	1	3	5	5	5
30	2	5	3	3	4
31	3	4	3	4	3
32	5	4	4	4	3
33	4	2	4	3	2

34	4	4	5	5	5
35	4	4	4	4	4
36	3	1	4	4	4
37	5	2	5	4	3
38	3	3	2	2	5
39	4	5	5	5	4
40	2	3	3	4	2
41	5	3	4	3	3
42	3	3	3	5	5
43	3	4	2	4	1
44	4	3	3	2	2
45	5	2	5	5	3
46	3	5	1	4	5
47	4	3	5	4	3
48	5	4	3	2	3
49	2	2	2	3	3
50	5	5	5	3	2
51	3	3	4	4	5
52	4	3	3	3	4
53	4	3	4	3	3
54	2	4	5	2	2
55	3	3	4	2	4
56	5	5	5	4	3
57	5	5	5	5	4
58	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	2
60	3	4	2	4	3
61	5	3	4	5	5
62	4	3	4	4	5
63	2	4	1	4	4
64	3	2	2	5	4
65	5	5	3	2	3

TA JAWBAN RESPONDEN

Jawaban atas pertanyaan

Perencanaan Bisnis		Pelat. Peren. Bisnis		Pemb. Manaj. Usaha
6	7	8	9	10
4	1	4	1	1
5	5	5	5	4
4	4	4	4	4
4	4	4	4	3
4	2	4	3	2
3	4	5	5	5
3	4	4	4	4
4	1	4	4	4
2	2	5	4	3
5	3	2	2	5
4	5	5	5	4
4	3	3	4	2
2	3	4	3	3
3	3	3	5	5
3	2	5	3	3
4	5	4	3	4
3	4	2	4	5
3	3	3	2	3
2	2	5	5	4
2	4	1	4	5
4	3	5	4	2
5	4	3	2	5
2	2	2	3	3
5	5	5	3	4
4	2	4	3	2
3	4	5	5	5
3	4	4	4	4
4	1	4	4	4
2	2	5	4	3
5	3	2	2	5
4	5	5	5	4
5	4	5	4	3
2	2	4	2	4

5	5	3	3	2
4	2	2	5	5
3	4	5	1	4
3	4	3	5	4
4	1	4	3	2
2	2	2	2	3
5	3	5	5	3
4	5	3	4	4
3	2	3	3	3
5	5	4	3	2
3	4	2	4	5
4	3	3	2	5
4	3	4	3	4
3	2	3	3	3
5	5	5	3	2
4	4	4	4	5
4	4	4	4	3
4	3	4	4	4
2	5	3	3	2
5	4	3	3	5
4	2	4	4	3
3	3	2	2	3
5	5	5	1	4
3	4	3	4	4
2	3	3	3	2
5	5	3	2	5
4	4	4	5	4
4	4	4	3	5
3	4	4	4	2
5	3	3	2	4
2	4	4	4	5
4	4	4	4	2

Sarana Pemasaran
11
5
5
4
4
5
5
4
4
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5
3
4
5
5
5
5
3
5
4
5
4
3
5
5
5

UNIVERSITAS TERBUKA

3
4
5
5
5
3
4
4
2
2
5
4
2
3
5
5
5
3
2
5
4
3
4
5
2
3
5
4
4
3
4
2

UNIVERSITAS TERBUKA